



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER UTAMA

# 2025

021-29832987



[pengadilanmiliterutama@gmail.com](mailto:pengadilanmiliterutama@gmail.com)



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG  
JAKARTA TIMUR



[www.miltama.dilmiltama.go.id](http://www.miltama.dilmiltama.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demi terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan akuntabel. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama selama tahun 2025.

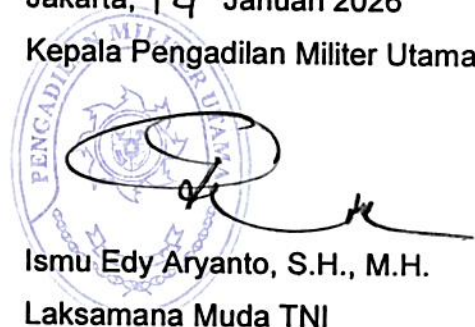
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025. Pengadilan Militer Utama terus berupaya meningkatkan kinerja layanan kepada publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik kepada pencari keadilan maupun kepada masyarakat pengguna layanan lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan telah disusun sesuai outline yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 telah diupayakan secara optimal dan obyektif, namun masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan ke depannya guna perbaikan layanan hukum dan layanan publik lainnya.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap hakim dan aparatur Pengadilan Militer Utama yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan. Semoga Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.

Jakarta, 14 Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.  
Laksamana Muda TNI

## DOKUMENTASI KEGIATAN PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2025

JANUARI 2025

Jakarta, 13 Januari 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025**. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh personel Pengadilan Militer Utama ini bertujuan agar



seluruh personel selalu ingat untuk menjaga Integritas sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Satker dan diri sendiri



Jakarta, 16 Januari 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. membuka **Kegiatan Sosialisasi RKAKL Pengadilan Militer Utama Tahun Anggaran 2025**.

Kegiatan Sosialisasi tersebut dimulai dengan Pemaparan RKAKL oleh Sekretaris

Dilmiltama Ibu Nuratiah, S.H., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dilmiltama dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

FEBRUARI 2026

Jakarta, 12 Februari 2025.  
Bertempat di Ruang Sidang  
Pengadilan Militer Utama,  
Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksda TNI Ismu Edy  
Aryanto, S.H., M.H. memimpin  
**Acara Pelantikan dan  
Pengambilan Sumpah  
Jabatan Marsma TNI Evi**



**Zuranda, S.H., M.H. sebagai Hakim Militer Utama** pada Pengadilan Militer Utama.



Jakarta, 20 Februari 2025  
Bertempat di Ruang Sidang  
Utama Pengadilan Militer  
Tinggi II Jakarta, Kepala  
Pengadilan Militer Utama  
Laksda TNI Ismu Edy  
Aryanto, S.H., M.H.  
memimpin **Acara Purna  
Bakti Ketua Kamar Militer  
Mahkamah Agung RI  
Mayjen (Purn) Dr. Burhan**

**Dahlan, S.H., M.H.** Kegiatan tersebut dihadiri oleh YM Hakim Agung Militer, Ditjen Badilmiltun MA RI, seluruh Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan Kepala Pengadilan Militer serta warga Peradilan Militer seluruh Indonesia secara daring.

Jakarta, 21 Februari 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin Acara **Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Kepala Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer.**



## MARET 2025



Jakarta, 6 Maret 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, telah dilaksanakan **Launching dan Sosialisasi Aplikasi SiePertama (Sistem Elektronik Penyelesaian Perkara Dilmiltama)** oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama. Dibuatnya

aplikasi ini merupakan salah satu wujud untuk mendukung program pemerintah dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi penggunaan kertas sehingga proses pemeriksaan berkas perkara dan penyelesaiannya menjadi paperless.

APRIL 2025

Jakarta, 8 April 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Kegiatan Apel Pagi Gabungan** yang dihadiri oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta. Kegiatan dilanjutkan dengan **Halal Bihalal** dalam rangka **Hari Raya Idul Fitri 1446 H.**



Jakarta, 9 April 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama Periode 1 April 2025 di Lingkungan Peradilan Militer.**

Jakarta, 16 April 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. beserta Wakadilmiltama, Hakim Militer Utama, Panitera dan Pejabat Kepaniteraan Dilmiltama, mengikuti **Pengarahan Khusus oleh Dirjen Badilmiltun MA**



**RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.** Pengarahan tersebut turut dihadiri oleh Para Hakim Militer Tinggi dan Para Hakim Militer di Wilayah Jakarta.

Jakarta, 16 April 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, telah dilaksanakan **Sidang Perbedaan Pendapat** yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. dengan Hakim Anggota Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan



Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., serta didampingi oleh Panitera Pengganti Kolonel Kum M. Idris, S.H., M.H. dan Letkol Chk M. Yahya, S.H., M.H. Hadir dalam persidangan tersebut Wakil Oditur Jenderal TNI Brigjen TNI Eko Prasetyo, S.H., M.H., serta Perwira Yang ditunjuk mewakili Papera Asrenum Panglima TNI yang hadir secara langsung dan Papera Kakum Korem 141/Toddopu yang hadir secara daring.



tersebut dihadiri oleh seluruh personel Peradilan Militer baik secara luring maupun daring.

Jakarta, 28 April 2025.

Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan Acara **Anotasi Pengadilan Militer Pertempuran** Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan Narasumber Dosen STHM Ditkumad Kolonel (Purn) Jacob Luna Sumuk, S.H. Acara

Jakarta, 6 Mei 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. didampingi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer Utama, melakukan **Kunjungan ke Oditurat Jenderal TNI dalam**



**rangka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas.** Pada kunjungan tersebut Kadilmiltama dan Tim disambut langsung oleh Oditur Jenderal TNI Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. beserta Tim. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang kedua Predikat tersebut sudah diraih oleh Pengadilan Militer Utama.



Jakarta, 15 Mei 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil** pada Pengadilan Militer Utama, atas nama Syarif Hasan, Lc., Riwando Manihuruk, S.H. dan Egia

Rasido Tarigan, S.H. Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan agar menjaga Integritas, meningkatkan Kinerja dan selalu menjunjung nilai-nilai ber-AKHLAK.

Jakarta, 20 Mei 2025.

Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II Jakarta, seluruh Personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta mengikuti Kegiatan **Upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-117 Tahun**



**2025** dengan Tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Hakim Militer Utama Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H.



Banjarmasin, 21 - 23 Mei 2025. Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Brigadir Jendral TNI Apel Ginting, S.H., M.H. didampingi Hakim Militer Utama Brigadir Jendral TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., Sekretaris Dilmiltama Ibu Nuratiah, S.H., M.H. serta

Panitera Pengganti Dilmiltama Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H. melaksanakan **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin**. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer.

JUNI 2025

Jakarta, 2 Juni 2025.

Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II Jakarta, seluruh Personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta mengikuti Kegiatan **Upacara Bendera Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2025** dengan Tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Hakim Militer Utama Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H.



Jakarta, 10 Juni 2025.

Bertempat di Gedung Pengadilan Militer Utama, dilaksanakan **Acara Peringatan Hari Jadi Peradilan Militer ke-79**. Hari Jadi Peradilan Militer jatuh pada tanggal 8 Juni setiap tahunnya, sesuai dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/SK.OTI.1/V/2025 tentang Penetapan Hari Jadi Peradilan Militer. Mengusung Tema “Peradilan Militer Tangguh, Indonesia Maju”, acara Peringatan Hari Jadi Peradilan Militer diawali dengan sambutan dari YM Ketua Muda Militer MA RI Brigjen (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. yang dibacakan oleh YM Hakim Agung Brigjen (Purn) Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Acara dilanjutkan dengan Pemotongan tumpeng oleh Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. yang diserahkan secara simbolis kepada YM Hakim Agung Brigjen (Purn) Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Kadilmiltama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. Kemudian acara diakhiri dengan Pengumuman Pemenang Lomba Yel-yel antar Satker dilingkungan Peradilan Militer dan penyerahan Piagam secara simbolis kepada para pemenang.

Medan, 18 - 20 Juni 2025.  
Bertempat di Pengadilan  
Militer Tinggi I Medan, telah  
dilaksanakan kegiatan  
**Sidang Keliling dengan  
Agenda Penyelesaian  
Perkara Tingkat Banding.**  
Sidang tersebut dipimpin



langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim Anggota Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., dan Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H., serta didampingi oleh Panitera Pengganti Letnan Kolonel Chk Ata Wijaya, S.H., M.H. Sidang Keliling ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama.



Jakarta, 30 Juni 2025.

Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan **Acara Pengantar Purnabakti Wakadilmiltama Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H.** Acara diawali dengan Kesan dan Pesan dari Wakadilmiltama beserta Ibu, lalu dilanjutkan

dengan Sambutan dari Kadilmiltama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. dan penyampaian Kesan dan Pesan dari personel Dilmiltama yang diwakili oleh Letkol Ata Wijaya, S.H., M.H. Acara tersebut juga dihadiri oleh Para Kadilmilti dan Kadilmil jajaran Peradilan Militer dan seluruh personel di Lingkungan Peradilan Militer baik secara luring maupun daring.

Jakarta, 11 Juli 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Kegiatan Pembinaan dan Pengarahan** untuk Para Kadilmilti, Hakim Militer Tinggi, Kadilmil dan Wakadilmil di Lingkungan Peradilan Militer. Pada



Kegiatan tersebut Kadilmiltama menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Penekanan Perma 7, 8, 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017;
2. Penyampain Kebijakan-kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer Utama;
3. Apresiasi kepada seluruh jajaran Peradilan Militer yang sudah turut memeriahkan Peringatan Hari Jadi Peradilan Militer; dan
4. Implementasikan 5 Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI serta tanamkan Integritas pada hati sanubari dan jaga citra Peradilan Militer.



S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 18 Juli 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Brigjen TNI Faridah Faisal,**

Manado, 20 - 22 Juli 2025.  
Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksda TNI Ismu  
Edy Aryanto, S.H., M.H.  
didampingi oleh  
Wakadilmiltama Brigjen  
TNI Faridah Faisal, S.H.,  
M.H. dan Hakim Militer



Utama Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti Dilmiltama Letkol Laut (H) Rachmad Roni, S.H., M.H. melaksanakan **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer III-17 Manado**. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer.

## AGUSTUS 2025



Jakarta, 4 Agustus 2025.  
Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksda TNI Ismu  
Edy Aryanto, S.H., M.H.  
beserta para Pejabat  
Pengadilan Militer Tinggi II  
Jakarta dan Pengadilan  
Militer II-08 Jakarta,

menerima **kunjungan dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rangka Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan Semester I 2025** pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025.

Jakarta, 17 Agustus 2025.

Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. menjadi Inspektur Upacara pada **Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia** dengan Tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".



Upacara tersebut diikuti oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta.



Jakarta, 19 Agustus 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. beserta seluruh Personel Pengadilan Militer Utama menghadiri **Upacara Peringatan HUT ke-80 Mahkamah Agung RI** yang dilaksanakan di Lapangan Tennis Indoor

Mahkamah Agung RI. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Pada Peringatan HUT ke-80 Mahkamah Agung RI ini mengusung Tema "PENGADILAN BERMARTABAT, NEGARA BERDAULAT" Pada Upacara tersebut, Jajaran Peradilan Militer dipercaya sebagai Panitia Penyelenggara Upacara. Bertindak sebagai Perwira Upacara Hakim Militer Tinggi Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H., dan Komandan Upacara Kadilmil II-08 Jakarta Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Agustus 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Letkol Chk (K) Iyah**



**Syafriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama.**

## SEPTEMBER 2025



Jakarta, 1 September 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, sebanyak 9 orang **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan disumpah** dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy

Aryanto, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan untuk menjaga amanah serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang ada di Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 1 Oktober 2025.

Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksda TNI Ismu Edy  
Aryanto, S.H., M.H. menjadi  
Inspektur

**Upacara  
Peringatan Hari Kesaktian  
Pancasila**

yang  
dilaksanakan pada hari  
Rabu, 1 Oktober 2025 di  
Lapangan Apel Dilmilti II



Jakarta. Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung Tema "PANCASILA PEREKAT BANGSA MENUJU INDONESIA RAYA" diikuti oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta.



Jakarta, 1 Oktober 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin **Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama Periode 1 Oktober 2025** di Lingkungan Peradilan Militer.

Jakarta, 17 Oktober 2025.

Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II Jakarta, seluruh personel Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Militer II-08 Jakarta melaksanakan **Kegiatan Olahraga Bersama.**



Kegiatan diawali dengan Apel Pagi Gabungan dan dilanjutkan dengan Kegiatan Senam Bersama. Pada Kegiatan tersebut turut hadir YM Hakim Agung Kamar Militer Brigjen (Purn) Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan YM Hakim Agung Kamar Militer Kolonel Chk (Purn) Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., YM Hakim Agung Kamar TUN Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. serta Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.



Sidoarjo, 22-24 Oktober 2025.

Bertempat di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah dilaksanakan **kegiatan Sidang Keliling dengan Agenda Penyelesaian Perkara Tingkat Banding.** Sidang

tersebut dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Anggota Brigjen TNI Faridah Faisal S.H., M.H. dan Marsma TNI Evi Zuraida S.H., M.H. serta didampingi oleh Panitera Pengganti Letkol Chk (K) Iyah Syafriah S.H., M.H. Sidang keliling ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan terhadap para masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 28 Oktober 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta mengikuti **Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda** yang mengusung Tema "PEMUDA PEMUDI BERGERAK, INDONESIA



BERSATU". Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kadilmilti II Jakarta Laksma TNI Tuty Kiptiani. S.H., M.H.

## NOVEMBER 2025



Jakarta, 3 November 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama, **Kolonel Chk (K) Ida Yanti, S.H., M.H. resmi dilantik dan disumpah sebagai Panitera Pengadilan Militer Utama** dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Utama

Laksamana Muda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan untuk menjaga Integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita (SK KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013).

Bekasi, 4 – 6 November 2025.  
Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksda TNI Ismu Edy  
Aryanto, S.H., M.H. beserta  
Sekretaris Pengadilan Militer  
Utama Ibu Nuratiah, S.H., M.H.  
menghadiri **Kegiatan Rapat  
Koordinasi Teknis di**



**Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.** Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. dengan Tema Kegiatan "Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Selaras dan Berintegritas". Pada kesempatan tersebut juga diselenggarakan Kegiatan Pemberian Apresiasi Bidang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Militer oleh Ditjen Badilmiltun MA RI.



Jakarta, 10 November 2025.

Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksamana Muda TNI  
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.  
menjadi Inspektur **Upacara  
Peringatan Hari Pahlawan**  
yang dilaksanakan pada hari  
Senin, 10 November 2025 di  
Lapangan Apel Dilmilti II  
Jakarta. Upacara Peringatan

Hari Pahlawan kali ini mengusung Tema "Pahlawanku Teladanku: Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan" yang diikuti oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta.

Jakarta, 18 November 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama Laksamana Muda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. memimpin Acara **Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Kepala**



**Pengadilan Militer Tipe B di Lingkungan Peradilan Militer.** Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan bahwa Seorang Kadilmil merupakan Role Model yang menjadi Inspirasi dan Teladan dari Organisasi yang dipimpin serta mampu melaksanakan reformasi birokrasi guna meraih dan mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Jakarta, 24 November 2025.

Tim IT Ditjen Badilmiltun melaksanakan **kegiatan Sosialisasi Aplikasi Persuratan yang di sebut SIMPAN Terintegrasi** kepada seluruh Personel Pengadilan Militer Utama bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama.

Jakarta, 27 November 2025.

**Universitas Pahlawan  
Tuanku Tambusai  
melaksanakan Studi  
Lapangan di Lingkungan  
Peradilan Militer se-Jakarta.**

Kegiatan tersebut dibuka oleh  
Kepala Pengadilan Militer  
Utama Laksmana Muda TNI  
Ismu Edy



Aryanto, S.H., M.H.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai struktur, kewenangan, serta proses peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Termasuk pemahaman mengenai mekanisme persidangan, penegakan disiplin militer, serta manajemen kelembagaan pada Pengadilan Militer Utama.

## DESEMBER 2025



Jakarta, 2 Desember 2025.

Bertempat di Ruang Sidang  
Utama Pengadilan Militer  
Utama, Kepala Pengadilan  
Militer Utama Laksamana  
Muda TNI Ismu Edy Aryanto,  
S.H., M.H. memimpin Acara  
**Pengambilan Sumpah dan  
Pelantikan Wakil Kepala  
Pengadilan Militer I-07**

**Balikpapan.** Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pengadilan Militer Utama mengamanatkan untuk berfokus pada reformasi dan birokrasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jakarta, 10 Desember 2025.

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer Utama. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Ahmad Djamhari, S.E., M.Tax., Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung, Choirul Bachri Lubis, S.T., M.M., Kepala Bidang Penyuluhan



Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur, Ismail, S.E., Ak., M.Si. melaksanakan **kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui Aplikasi CORETAX** yang diikuti oleh seluruh Personel Pengadilan Militer Utama.



Bandung, 12 Desember 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. didampingi oleh Panmud Pidana Dilmiltama Kolonel Sus Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Kabag Umum dan Keuangan

Dilmiltama Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Dilmiltama Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H. melaksanakan **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung**. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer.

Jakarta, 17 Desember 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. didampingi oleh Hakim Militer Utama Dilmiltama Brigjen TNI Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. dan Sekretaris



Dilmiltama Nuratiah, S.H., M.H. melaksanakan **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta**. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer.



Jakarta, 18 Desember 2025.

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. didampingi oleh Hakim Militer Utama Dilmiltama Brigjen TNI Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. dan Sekretaris Dilmiltama Nuratiah, S.H., M.H.

melaksanakan **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta**. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>24</b>
A. Kondisi Umum .....	24
B. Dasar Hukum .....	24
C. Arah Kebijakan .....	25
D. Rencana Strategis .....	25
E. Struktur Organisasi .....	31
<b>BAB II KEADAAN PERKARA .....</b>	<b>32</b>
A. Keadaan Perkara .....	32
B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer Utama .....	36
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>38</b>
A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan .....	38
B. Mutasi/Promosi .....	42
C. Kenaikan pangkat dan Pensiun.....	42
D. Tanda Kehormatan .....	43
E. Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	44
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI.....</b>	<b>46</b>
A. Pengelolaan Keuangan .....	57
B. Sarana dan Prasarana .....	57
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	61
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>66</b>
A. Akreditasi Penjamin Mutu .....	66
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	70
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	71
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Internal.....	76
B. Pengawasan Daerah .....	76
C. Pengawasan Bidang .....	79
D. Evaluasi .....	81
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia. Pengadilan Militer Utama berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang secara struktur di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer Utama selain mempunyai fungsi mengadili (*judicial power*), juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demi terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan akuntabel, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis berdasarkan data dan fakta, bertujuan untuk evaluasi kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Pengadilan Militer Utama sebagai salah satu pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

### B. Dasar Hukum

Dasar penyusunan laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan
4. Rencana Stragetis Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Pengadilan Militer Utama.

### C. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
2. Proses berperkara sederhana dan cepat sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui inovasi pelayanan perkara pidana secara eketronik (aplikasi E-Berpadu);
4. Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan beberapa inovasi untuk memberikan kepuasan kepada Masyarakat;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui pengiriman salinan putusan dan berkas perkara tepat waktu;
6. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang di luar gedung pengadilan;
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh jajaran di lingkungan Peradilan Militer; dan
8. Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset.

### D. Rencana Strategis

#### 1. Visi

Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”***

#### 2. Misi

Misi Pengadilan Militer Utama dalam mencapai Visi adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer Utama memiliki motto **T.E.R.B.A.I.K** sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- T : Tanggap
- E : Energik
- R : Rasional
- B : Bijaksana
- A : Adil
- I : Inisiatif
- K : Konsisten

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer Utama menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

#### a. **Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern**

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan.</li> </ol> </li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk);</li> <li>• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya;</li> </ul>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; dan</li> <li>• SOP Dilmiltama (hal. 7) penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada Dilmiltama diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding.</li> </ul> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; dan</li> <li>• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>	
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}}$ <p><b>Catatan :</b> Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan);</li> <li>• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 230 ayat (1) salinan putusan pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.</li> </ul>	100%
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}$ <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</li> </ul>	100%

**b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik**

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	TARGET
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>Pelayanan permohonan informasi</li> </ol>	90

**c. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional**

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	TARGET
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	91

			<p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b> Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>• Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>• Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker  Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		70
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b> Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024;  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>		3,3

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Militer Utama menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. **Program :** Penegakan dan pelayanan hukum

**Kegiatan :** Peningkatan manajemen peradilan militer

- a. **Indikator Kegiatan:** Koordinasi (Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan).
- b. **Indikator Kegiatan:** Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, Perkara yang disidang di luar gedung pengadilan, dan Pengiriman Salinan Putusan).

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
- c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

2. **Program** : Dukungan manajemen

a. **Kegiatan** : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

**Indikator Kegiatan**: Layanan dukungan manajemen internal

b. **Kegiatan** : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

**Indikator Kegiatan**: Layanan sarana dan prasarana internal.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan



## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. Keadaan Perkara

##### 1. Keadaan Perkara di Pengadilan Militer seluruh Indonesia

Keadaan perkara di jajaran Pengadilan Militer seluruh Indonesia baik perkara kejahatan dan pelanggaran pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

###### a. Perkara Kejahatan

- i. Sisa perkara tahun 2024 : 230 Perkara
- ii. Perkara masuk tahun 2025 : 2.509 Perkara
- iii. Putus : 2.467 Perkara
- iv. Kembali : 21 Perkara
- v. Putus NO : Nihil
- vi. Sisa perkara Tahun 2025 : 251 Perkara

###### b. Perkara Pelanggaran

- i. Sisa Perkara tahun 2024 : Nihil
- ii. Perkara masuk tahun 2025 : 246 Perkara
- iii. Putus : 246 Perkara
- iv. Kembali : Nihil
- v. Sisa perkara tahun 2025 : Nihil

##### 2. Keadaan Perkara di Pengadilan Militer Utama

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah menyelesaikan perkara banding baik perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Mayor keatas serta perbedaan pendapat sebagai berikut :

###### a. Perkara Banding

Jumlah perkara yang diputus adalah 26 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sisa tahun 2024 : 2 Perkara
- ii. Perkara masuk tahun 2025 : 24 Perkara
- iii. Putus : 26 Perkara
- iv. Dikembalikan/dilimpahkan : Nihil
- v. Sisa tahun 2025 : Nihil

Jumlah amar putusan adalah 26 putusan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Menguatkan : 14 Perkara
- ii. Memperbaiki : 8 Perkara
- iii. Membatalkan : 2 Perkara
- iv. Tidak dapat diterima : Nihil
- v. Dikembalikan untuk disidangkan : 2 Perkara

b. Perkara Perbedaan Pendapat

Jumlah perkara perbedaan pendapat adalah 5 perkara sebagai berikut:

- i. Sisa perkara tahun 2024 : Nihil
- ii. Perkara masuk tahun 2025 : 5 Perkara
- iii. Putus : 5 Perkara
- iv. Dikembalikan : Nihil
- v. Sisa tahun 2025 : Nihil

Jumlah amar putusan perkara perbedaan pendapat adalah 5 Perkara sebagai berikut :

- i. Disidangkan di Pengadilan Militer : 4 Perkara
- ii. Dikembalikan ke PAPERERA : 1 Perkara

BULAN	KEADAAN PERKARA TAHUN 2025																															
	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				DIKEMBALIKAN/ DILIMPALKAN				YANG SUDAH BHT				PUTUS NO				SISA AKHIR							
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML				
<b>JANUARI</b>																																
- Tingkat Banding	1	0	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FEBRUARI</b>																																
- Tingkat Banding	1	0	1	2	2	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MARET</b>																																
- Tingkat Banding	2	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<b>APRIL</b>																																
- Tingkat Banding	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
- Perbedaan Pendapat	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MEI</b>																																
- Tingkat Banding	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUNI</b>																																
- Tingkat Banding	0	1	1	2	3	2	1	6	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JULI																											
- Tingkat Banding	1	2	2	5	3	0	0	3	2	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AGUSTUS																											
- Tingkat Banding	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
- Perbedaan Pendapat	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER																											
- Tingkat Banding	2	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTOBER																											
- Tingkat Banding	3	1	0	4	0	0	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER																											
- Tingkat Banding	2	0	2	4	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER																											
- Tingkat Banding	2	1	0	3	1	0	0	1	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Perbedaan Pendapat	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer Utama

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Jumlah Sisa Perkara pada awal Tahun 2025 ada sejumlah 2 perkara dan telah diputus tepat waktu dalam rentang kurang dari 3 bulan sejak perkara tersebut masuk pada Tahun 2024. Sehingga persentase sisa perkara yang diputus mencapai 100%.

### 2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN
1	JANUARI	3	0	0	0
2	FEBRUARI	2	0	0	0
3	MARET	3	0	0	0
4	APRIL	2	0	0	0
5	MEI	2	0	0	0
6	JUNI	3	0	0	0
7	JULI	5	0	0	0
8	AGUSTUS	2	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0
10	OKTOBER	2	0	0	0
11	NOVEMBER	2	0	0	0
12	DESEMBER	3	2	0	0
TOTAL		29	2	0	0

Dari jumlah perkara banding dan jumlah perkara perbedaan pendapat yang harus diselesaikan ada sejumlah 31 Perkara, 29 Perkara diputus dalam kurun waktu < 3 bulan dan 2 Perkara diputus dalam kurun waktu 4-5 bulan. Dari jumlah tersebut, maka persentase perkara yang diputus tepat waktu mencapai 93,54%.

### 3. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dari jumlah 31 perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer Utama, untuk perkara banding sejumlah 26 putusan, dan untuk perkara perbedaan pendapat ada sejumlah 5 putusan. Khusus untuk perkara perbedaan pendapat tidak ada Upaya Hukum Kasasi. Dari jumlah 26 putusan perkara banding, ada sejumlah 15 putusan yang mengajukan upaya hukum kasasi, ada sejumlah 8 putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan ada sejumlah 3 putusan yang masih dalam proses minutasasi sehingga dari perhitungan tersebut, maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 30,77 %.

#### 4. Sidang Keliling

Pada Tahun 2025 Dilmiltama telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Dilaksanakan di Medan yaitu Perkara Tingkat Banding atas nama Terdakwa atas nama Agus Surya Dharmawan, S.E., Kolonel Laut (P) NRP 10331/P dan 1 (satu) perkara lainnya. Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2025 di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Agenda mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang keliling tersebut tertuang dalam Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 272/KPMU/SP.HK2.3/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
- b. Dilaksanakan di Surabaya yaitu Perkara Tingkat Banding atas nama Terdakwa Hermansyah, Mayor Laut (S), NRP 18767/P dan 1 (satu) perkara lainnya. Sidang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2025 di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Agenda mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang keliling tersebut tertuang dalam Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 601/KPMU/SP.HK2.3/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

NO	BULAN	TANGGAL SIDANG	TEMPAT SIDANG	JUMLAH PERKARA YANG DI SIDANGKAN	JUMLAH PERKARA YANG PUTUS	BIAYA SIDANG	KET
1	JANUARI	NIHIL					
2	FEBRUARI	NIHIL					
3	MARET	NIHIL					
4	APRIL	NIHIL					
5	MEI	NIHIL					
6	JUNI	18 s.d. 20 Juni 2025	Dilmilti I Medan	2	2	Rp. 31.472.365	
7	JULI	NIHIL					
8	AGUSTUS	NIHIL					
9	SEPTEMBER	NIHIL					
10	OKTOBER	22 s.d. 24 Oktober 2025	Dilmilti III Surabaya	2	2	Rp26.914.447	
11	NOVEMBER						Sisa Anggaran Rp. 433.188
12	DESEMBER	NIHIL					
JUMLAH				4	4	Realisasi Rp.58.386.812	Jumlah Pagu Rp.58.820.000

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

Di lingkungan Pengadilan Militer sumber daya manusia pada dasarnya di bagi dalam 2 kelompok. Berdasarkan kualifikasinya dan berdasarkan sumber rekrutmennya. Berdasarkan kualifikasinya, SDM dibedakan dalam tenaga teknis dan tenaga non teknis. Sedang berdasarkan sumber rekrutmennya, dibedakan sebagai personel TNI dan Aparatur Sipil Negara. Dua perbedaan mendasar ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan dan pembinaannya. Sumber Daya Manusia (aparatur peradilan militer) yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer Utama berjumlah 1.015 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 530 personel TNI dan 485 ASN yang tersebar di 23 unit satuan kerja lingkungan Peradilan Militer, serta 3 unit kerja Eselon I yang tersebar pada Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA RI dan Bawas MA RI. 23 unit satuan kerja tersebut adalah Pengadilan Militer Utama, 3 Dilmilti, 15 Pengadilan Militer tipe A dan 4 Pengadilan Militer tipe B.

Adapun komposisi sumber daya manusia di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer Utama dalam membina personelnnya adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONEL	
		TNI	ASN
1.	Pengadilan Militer Utama	29	34
2.	Pengadilan Tinggi I Medan	16	35
3.	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	19	19
4.	Pengadilan Militer I-02 Medan	28	26
5.	Pengadilan Militer I-03 Padang	13	19
6.	Pengadilan Militer I-04 Palembang	21	26
7.	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	16	21
8.	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	10	20
9.	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	14	14
10.	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	27	31
11.	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	33	26

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONEL	
		TNI	ASN
12.	Pengadilan Militer II-09 Bandung	21	20
13.	Pengadilan Militer II-10 Semarang	24	14
14.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	25	18
15.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	24	26
16.	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	26	22
17.	Pengadilan Militer III-13 Madiun	24	20
18.	Pengadilan Militer II-14 Denpasar	17	21
19.	Pengadilan Militer III-15 Kupang	11	17
20.	Pengadilan Militer III-16 Makassar	21	13
21.	Pengadilan Militer III-17 Manado	16	13
22.	Pengadilan Militer III-18 Ambon	15	19
23.	Pengadilan Militer III-19 Jayapura	18	11
24.	Mahkamah Agung RI	37	-
25.	Ditjen Badilmiltun MA RI	21	-
26.	Bawas MA RI	4	-
<b>Jumlah</b>		<b>530</b>	<b>485</b>

Jumlah personel di Pengadilan Militer Utama saat ini berjumlah 63 orang, terdiri dari 29 personel TNI, 21 PNS dan 13 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun Komposisi personel sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia di bidang teknis

Jumlah sumber daya manusia di bidang teknis ada sejumlah 16 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hakim 5 orang terdiri dari 5 orang Perwira Tinggi termasuk Kepala dan Wakil.
- b. Kepaniteraan terdiri dari Panitera 1 orang TNI, Panitera Muda 1 orang TNI, Panitera Pengganti 4 orang TNI dan Staf Kepaniteraan terdiri dari 2 orang TNI dan 9 orang ASN.

2. Sumber daya manusia di bidang non teknis

Sumber daya manusia di bidang Kesekretariatan berjumlah 41 orang terdiri dari 16 orang TNI, 16 orang PNS dan 9 orang PPPK.

Distribusi Jabatan struktural adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh TNI.
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh TNI.
3. Panitera dijabat oleh TNI.
4. Sekretaris dijabat oleh PNS.
5. Panitera Muda Pidana dijabat oleh TNI.
6. Panitera Muda Hukum belum terisi.
7. Panitera Muda TUM belum terisi.
8. Kabag Umum dan Keuangan dijabat oleh TNI.
9. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian dijabat oleh PNS.
10. Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran dijabat oleh PNS.
11. Kasubag Kepegawaian dan IT belum terisi.
12. Kasubag Keuangan dan Pelaporan dijabat oleh PNS.
13. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga dijabat oleh TNI.

Komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pangkat/Golongan sebagai berikut :

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
<b>TNI</b>		
1	Mayjen/Marsda/Laksda TNI	1
2	Brigjen/Masma/Laksma TNI	5
3	Kolonel	2
4	Letnan Kolonel	4
5	Mayor	-
6	Kapten	2
7	Letnan Satu	-
8	Letnan Dua	1
9	Peltu	1
10	Pelda	-
11	Serma	1
12	Serka	4
13	Sertu	2
14	Serda	1
15	Kopka	2

16	Koptu	-
17	Kopda	2
18	Praka	-
19	Pratu	1
20	Prada	-
<b>TOTAL TNI</b>		<b>29 ORANG</b>
<b>PNS (PANGKAT/GOLONGAN)</b>		
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	-
4	Penata Tk I (III/d)	3
5	Penata (III/c)	-
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
7	Penata Muda (III/a)	6
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	2
<b>TOTAL PNS</b>		<b>21 ORANG</b>
<b>PPPK (GOLONGAN)</b>		
1	IX	3
2	V	9
3	Paruh Waktu	1
<b>TOTAL PPPK</b>		<b>13 ORANG</b>

Komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	TNI	ASN
1	S3	1	-
2	S2	12	4
3	S1	5	17
4	Diploma	-	3
5	SLTA	11	10
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>34</b>

## B. Mutasi/Promosi

Promosi dan Mutasi dalam suatu organisasi adalah hal yang biasa dilakukan untuk kepentingan dan penyegaran organisasi serta bentuk pengembangan karir pegawai yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan. Selama tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan promosi/mutasi bagi personel di jajaran Pengadilan Militer sebanyak 124 kali yang terdiri dari 121 personel TNI dan 3 personel PNS.

NO	BULAN	TNI	ASN
1	Januari	22	1
2	Februari	2	
3	Maret	9	
4	April	1	
5	Mei	11	10
6	Juni	25	32
7	Juli	39	2
8	Agustus		12
9	September	4	197
10	Oktober	6	3
11	November	24	3
12	Desember	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>144</b>	<b>260</b>

## C. Kenaikan pangkat dan Pensiun

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sesuai dengan bulan genap setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

NO	BULAN	TNI	PNS
1	Januari		
2	Februari		2
3	Maret		
4	April	46	12
5	Mei		
6	Juni		2
7	Juli		

8	Agustus		3
9	September		
10	Oktober	59	10
11	November		6
12	Desember		1
<b>JUMLAH</b>		<b>105</b>	<b>36</b>

Sedangkan masa pensiun adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia tertentu dan diharuskan untuk berhenti bekerja.

NO	PENSIUN	TAHUN 2025
1	TNI	15
2	PNS	16
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>

#### D. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Selama tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah mengajukan tanda kehormatan negara sebanyak 55 orang yang terdiri dari :

TNI	Tanda Kehormatan (Jumlah orang yang diajukan selama Tahun 2025)									Total
	SL K VIII	SL K XVI	SL K XXIV	Dharma Bantala	Dharma Nusa	Yudha Dharma Nararya	Kartika Eka Paksi	Swa Bhuana Paksa	Dwidya Sistha	
	16	21	36	3	1	11	2	1	1	

PNS	Tanda Kehormatan (Jumlah orang yang diajukan selama Tahun 2025) pada Dilmiltama		
	X	Dwiwindu	XXX
	1	1	1

### E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ada sejumlah personel yang ikut diklat yaitu :

NO	DASAR	KEGIATAN	PESERTA
1.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 29/KPMU/SP.DL1.6/II/2025 tanggal 17 Januari 2025	Bimtek Asesor secara luring pada tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025	1. Marsma TNI Arif Wicaksono, S.H. 2. Letkol Laut (H) Rachmad Roni, S.H., M.H. 3. Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H. 4. Erichon Bangun, S.E., M.M. 5. Letkol Chk Ata Wijaya, S.H., M.H. 6. Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. 7. Kolonel Kum Muhammad Idris, S.H., M.H.
2.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 30/KPMU/SP.DL1.6/II/2025 tanggal 17 Januari 2025	Bimtek Asesor secara daring pada tanggal 20 s.d. 22 Januari 2025	1. Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. 2. Nuratiah, S.H., M.H.
3.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 288/KPMU/SP.DL1.6/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025	Bimtek Aplikasi Srikandi pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025	Kapten Chk Thomas Willem Richard Imbiri, S.E., S.H.
4.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 291/KPMU/SP.DL1.6/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025	Bimtek Aplikasi Srikandi pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2025	Fitrika Arfaningrum, S.E.
5.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 356/KPMU/SP.DL1.10/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025	Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2025	Kolonel Kum Muhammad Idris, S.H., M.H.
6.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor	Bimtek Kepaniteraan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2025	Letkol Chk Ata Wijaya, S.H., M.H.

	364/KPMU/SP.DL1.10/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025		
7.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 393/KPMU/SP.HM2.1/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial pada tanggal 29 Juli 2025	1. Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. 2. Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H. 3. Letkol Chk Ata Wijaya, S.H., M.H. 4. Egia Rasido Tarigan, S.H. 5. Herdian Syahfrufin, A.Md.
8.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 435/KPMU/SP.DL1.2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025	<i>e-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	1. Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 2. Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. 3. Marsma TNI Arif Wicaksono, S.H., M.H. 4. Nuratiah, S.H., M.H.
9.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 623/KPMU/SP.HM3/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025	Bimtek Keprotokolan pada tanggal 3 s.d. 4 November 2025	Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H.
10.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 624/KPMU/SP.HM3/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025	Bimtek Administrasi Yudisial pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2025	Kolonel Kum Muhammad Idris, S.H., M.H.

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer Utama meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer Utama diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan serta Staf Pengelola PNBPNBP. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer Utama didukung sumber daya berupa penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA-005.01.2.663161/2025 Tanggal 2 Desember 2024
2. DIPA-005.05.2.663162/2025 Tanggal 2 Desember 2024

#### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada awal tahun 2025, jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI sebesar Rp6.630.218.000,- (Enam miliar enam ratus tiga puluh dua ratus delapan belas ribu rupiah). Pada tahun 2025, anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu:

- a. Pada bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp1.114.049.000,- (Satu miliar seratus empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari **Belanja Barang** sebesar Rp835.949.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar Rp278.100.000,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir belanja barang dan belanja modal sehingga hanya menyisakan blokir anggaran **Belanja**

- Barang** perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.233.000.000,- (Empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - d. Pada bulan September 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp428.745.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.661.745.000,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengalami pengurangan anggaran **Belanja Barang** Honor PPNPN sebesar Rp191.920.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. Pada bulan Oktober 2025, Pengadilan Militer Utama mendapatkan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) **Belanja Modal** sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dari jumlah pagu sebesar Rp349.000.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja modal menjadi Rp378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - f. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
  - g. Pada bulan November 2025 mendapatkan penambahan anggaran **Belanja Pegawai** sebesar Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.931.745.000,- (Empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

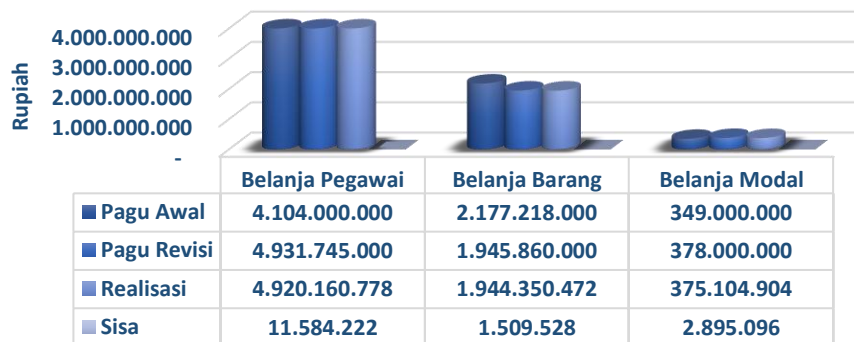
Berikut ini adalah tabel dan grafik dari realisasi belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI:

Tabel Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA
1	Belanja Pegawai	4.104.000.000	4.931.745.000	4.920.160.778	99,77	11.584.222
2	Belanja Barang	2.177.218.000	1.945.860.000	1.944.350.472	99,92	1.509.528
3	Belanja Modal	349.000.000	378.000.000	375.104.904	99,23	2.895.096
<b>JUMLAH</b>		<b>6.630.218.000</b>	<b>7.255.695.000</b>	<b>7.239.616.154</b>	<b>99,78</b>	<b>15.988.846</b>

Gambar Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

### PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI



## 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MA RI

Pada awal tahun 2025, jumlah alokasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp431.916.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah). Pada tahun 2025, anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI mengalami **penyesuaian anggaran** yaitu:

- a. Pada bulan Januari 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan pemotongan anggaran **Belanja Barang** Bimtek Kepaniteraan sebesar Rp246.526.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

- b. Pada bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran anggaran **Belanja Barang** sebesar Rp124.823.000,- (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- c. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir anggaran dan hanya menyisakan blokir anggaran **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- d. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu **Belanja Barang** perjalanan dinas sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- e. Pada bulan Oktober 2025, Dirjen Badilmiltun MA RI melakukan pemotongan anggaran **Belanja Barang** perkara banding dan perkara perbedaan pendapat sebesar Rp4.115.000,- (Empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Barang	431.916.000	126.040.000	121.825.221	96,66	4.214.779
<b>JUMLAH</b>		<b>431.916.000</b>	<b>126.040.000</b>	<b>121.825.221</b>	<b>96,66</b>	<b>4.214.779</b>

**Gambar Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI**

### PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN



Pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, Koordinasi percepatan penyelesaian perkara, dan pembinaan serta pengawasan pada Lingkungan Peradilan Militer di seluruh Indonesia.

Pengelolaan keuangan seluruh Pengadilan Militer di Indonesia termasuk pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

NO	SATKER	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI		SISA DANA
			Rp	%	
<b>DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI)</b>					
1	<b>Dilmiltama</b>	<b>7,255,605,000</b>	<b>7,239,616,154</b>	<b>99.78%</b>	<b>15,988,846</b>
	Belanja Pegawai	4,931,745,000	4,920,160,778	99.77%	11,584,222
	Belanja Barang	1,945,860,000	1,944,350,472	99.92%	1,509,528
	Belanja Modal	378,000,000	375,104,904	99.23%	2,895,096
2	<b>Dilmilti I Medan</b>	<b>8,445,350,000</b>	<b>8,220,103,010</b>	<b>97.33%</b>	<b>225,246,990</b>
	Belanja Pegawai	6,105,032,000	5,927,803,331	97.10%	177,228,669
	Belanja Barang	2,263,318,000	2,215,376,679	97.88%	47,941,321
	Belanja Modal	77,000,000	76,923,000	99.90%	77,000
3	<b>Dilmil I-01 Aceh</b>	<b>5,203,158,000</b>	<b>5,110,357,233</b>	<b>98.22%</b>	<b>92,800,767</b>
	Belanja Pegawai	3,570,775,000	3,497,229,868	97.94%	73,545,132
	Belanja Barang	1,632,383,000	1,613,127,365	98.82%	19,255,635
	Belanja Modal	-	-	-	-
4	<b>Dilmil I-02 Medan</b>	<b>6,219,406,000</b>	<b>6,194,000,555</b>	<b>99.59%</b>	<b>25,405,445</b>
	Belanja Pegawai	4,856,693,000	4,832,571,600	99.50%	24,121,400
	Belanja Barang	1,282,713,000	1,281,428,955	99.90%	1,284,045
	Belanja Modal	80,000,000	80,000,000	100.00%	0
5	<b>Dilmil I-03 Padang</b>	<b>4,617,776,000</b>	<b>4,487,774,004</b>	<b>97.18%%</b>	<b>130,001,996</b>
	Belanja Pegawai	2,582,542,000	2,559,602,475	99.11%	22,939,525
	Belanja Barang	1,269,234,000	1,215,758,024	95.78%	53,475,976
	Belanja Modal	766,000,000	712,413,505	93.00%	53,586,495
6	<b>Dilmil I-04 Palembang</b>	<b>5,475,086,000</b>	<b>5,422,214,367</b>	<b>99.03%</b>	<b>52,871,633</b>
	Belanja Pegawai	4,146,984,000	4,119,519,485	99.34%	27,464,515
	Belanja Barang	1,328,102,000	1,302,694,882	98.09%	25,407,118
	Belanja Modal	0	0	0%%	0
7	<b>Dilmil I-05 Pontianak</b>	<b>6,154,065,000</b>	<b>6,099,956,485</b>	<b>99.12%</b>	<b>54,108,515</b>
	Belanja Pegawai	4,684,748,000	4,644,104,308	99.13%	40,643,692
	Belanja Barang	1,304,317,000	1,290,852,177	98.97%	13,464,823
	Belanja Modal	165,000,000	165,000,000	100.00%	0
8	<b>Dilmil I-06 Banjarmasin</b>	<b>4,323,803,000</b>	<b>4,069,360,578</b>	<b>94.12%</b>	<b>254,442,422</b>

NO	SATKER	PAGU DIPAA	TOTAL REALISASI		SISA DANA
			Rp	%	
	Belanja Pegawai	3,086,557,000	2,990,552,831	96.89%	96,004,169
	Belanja Barang	1,237,246,000	1,078,807,747	87.19%	158,438,253
	Belanja Modal	0	0	0.00%	0
9	<b>Dilmil I-07 Balikpapan</b>	<b>4.666.808.000</b>	<b>4.630.601.784</b>	<b>99,22%</b>	<b>36.206.216</b>
	Belanja Pegawai	3.123.043.000	3.097.335.297	99,18%	25.707.703
	Belanja Barang	1.488.765.000	1.488.266.487	99,97%	499
	Belanja Modal	55.000.000	45.000.000	81,82%	10.000.000
10	<b>Dilmilti II Jakarta</b>	<b>12,759,458,000</b>	<b>12,557,978,109</b>	<b>98.42%</b>	<b>201,479,891</b>
	Belanja Pegawai	10,062,874,000	9,888,996,387	98.27%	173,877,613
	Belanja Barang	2,264,584,000	2,241,022,782	98.96%	23,561,218
	Belanja Modal	432,000,000	427,958,940	99.06%	4,041,060
11	<b>Dilmil II-08 Jakarta</b>	<b>8,601,000,000</b>	<b>8,470,679,990</b>	<b>98.48%</b>	<b>130,320,010</b>
	Belanja Pegawai	6,258,004,000	6,134,098,429	98.02 %	123,905,571
	Belanja Barang	2,192,996,000	2,190,714,241	99.90%	2,281,759
	Belanja Modal	150,000,000	145,867,320	97.24%	4,132,680
12	<b>Dilmil II-09 Bandung</b>	<b>32,904,737,000</b>	<b>10,494,632,341</b>	<b>31.89%</b>	<b>22,410,104,659</b>
	Belanja Pegawai	3,342,954,000	3,298,339,860	98.67%	44,614,140
	Belanja Barang	1,391,783,000	1,353,088,022	97.22%	38,694,978
	Belanja Modal	28,170,000,000	5,843,204,459	20.74%	22,326,795,541
13	<b>Dilmil II-10 Semarang</b>	<b>3,496,996,000</b>	<b>3,470,211,539</b>	<b>99.34%</b>	<b>30,922,127</b>
	Belanja Pegawai	3,496,996,000	3,470,211,539	99.23%	26,784,461
	Belanja Barang	1,171,160,000	1,167,022,334	99.65%	4,137,666
	Belanja Modal	0	0	0%	0
14	<b>Dilmil II-11 Yogyakarta</b>	<b>4,247,687,000</b>	<b>4,145,531,231</b>	<b>97.60%</b>	<b>102,155,769</b>
	Belanja Pegawai	3,024,004,000	2,933,279,109	97.00%	90,724,891
	Belanja Barang	1,128,683,000	1,117,327,124	98.99%	11,355,876
	Belanja Modal	95,000,000	94,924,998	99.92%	75,002
15	<b>Dilmilti III Surabaya</b>	<b>11,507,552,000</b>	<b>11,369,583,564</b>	<b>98.80%</b>	<b>137,968,436</b>
	Belanja Pegawai	8,976,308,000	8,852,214,284	98,62%	124,093,716
	Belanja Barang	2,286,244,000	2,272,445,281	99,40%	13,798,719
	Belanja Modal	245,000,000	244,923,999	99,97%	76,001
16	<b>Dilmil III-12 Surabaya</b>	<b>5,575,843,000</b>	<b>5,527,874,752</b>	<b>99.14%</b>	<b>47,968,248</b>
	Belanja Pegawai	4,146,696,000	4,131,912,201	<b>99.64%</b>	<b>14,783,799</b>
	Belanja Barang	1,364,147,000	1,330,962,551	<b>97.57%</b>	<b>33,184,449</b>
	Belanja Modal	65,000,000	65,000,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
17	<b>Dilmil III-13 Madiun</b>	<b>3,546,851,000</b>	<b>3,518,992,152</b>	<b>99.21%</b>	<b>27,858,848</b>
	Belanja Pegawai	2,393,295,000	2,374,730,125	<b>99.22%</b>	<b>18,564,875</b>
	Belanja Barang	961,056,000	951,762,027	<b>99.03%</b>	<b>9,293,973</b>
	Belanja Modal	192,500,000	192,500,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

NO	SATKER	PAGU DIPAA	TOTAL REALISASI		SISA DANA
			Rp	%	
18	<b>Dilmil III-14 Denpasar</b>	<b>5,643,459,000</b>	<b>5,630,535,487</b>	<b>99.77%</b>	<b>12,923,513</b>
	Belanja Pegawai	3,862,076,000	3,849,799,888	99.68%	12,276,112
	Belanja Barang	1,406,683,000	1,406,099,649	99.96%	583,351
	Belanja Modal	374,700,000	374,635,950	99.98%	64,050
19	<b>Dilmil III-15 Kupang</b>	<b>4,608,877,000</b>	<b>4,595,759,765</b>	<b>99.72%</b>	<b>13,117,235</b>
	Belanja Pegawai	3,514,406,000	3,501,862,610	99.64%	12,543,390
	Belanja Barang	1,094,471,000	1,093,897,155	99.95%	573,845
	Belanja Modal	0	0	0%	0
20	<b>Dilmil III-16 Makassar</b>	<b>5,819,430,000</b>	<b>5,782,238,013</b>	<b>99.36%</b>	<b>37,191,987</b>
	Belanja Pegawai	4,051,840,000	4,025,115,342	99.34%	26,724,657
	Belanja Barang	1266049000	1,264,507,604	99.87%	1,541,396
	Belanja Modal	501,541,000	492,430,000	98.18%	9,111,000
21	<b>Dilmil III-17 Manado</b>	<b>4,376,809,000</b>	<b>4,358,560,515</b>	<b>99.58%</b>	<b>18,248,485</b>
	Belanja Pegawai	2,943,614,000	2,929,442,384	99.52%	14,171,616
	Belanja Barang	1,433,195,000	1,429,118,131	99.72%	4,076,869
	Belanja Modal	0	0	0	0
22	<b>Dilmil III-18 Ambon</b>	<b>6,090,648,000</b>	<b>6,031,928,592</b>	<b>99.04%</b>	<b>58,719,408</b>
	Belanja Pegawai	4,617,841,000	4,583,333,500	99.25%	34,507,500
	Belanja Barang	1,432,967,000	1,408,755,092	98.31%	24,211,908
	Belanja Modal	39,840,000	39,840,000	100.00%	0
23	<b>Dilmil III-19 Jayapura</b>	<b>5,002,272,000</b>	<b>4,889,417,560</b>	<b>97.74%</b>	<b>112,854,440</b>
	Belanja Pegawai	3,845,584,000	3,801,787,332	98.86%	43,796,668
	Belanja Barang	1,036,688,000	968,716,078	93.44%	67,971,922
	Belanja Modal	120,000,000	118,914,150	99.10%	1,085,850

NO	SATKER	PAGU DIPAA	TOTAL REALISASI		SISA DANA
			Rp	%	
<b>DIPA 05 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA)</b>					
1	<b>Dilmiltama</b>	<b>126,040,000</b>	<b>121,825,221</b>	<b>96.66%</b>	<b>4,214,779</b>
	Belanja Barang	126,040,000	121,825,221	96.66%	4,214,779
2	<b>Dilmilti I Medan</b>	<b>520,705,000</b>	<b>512,760,459</b>	<b>98.47%</b>	<b>7,944,541</b>
	Belanja Barang	512,760,459	512,760,459	98.47%	7,944,541
3	<b>Dilmil I-01 Aceh</b>	<b>220,489,000</b>	<b>220,247,060</b>	<b>99.89%</b>	<b>241,940</b>
	Belanja Barang	220,489,000	220,247,060	99.89%	241,940
4	<b>Dilmil I-02 Medan</b>	<b>193,281,000</b>	<b>193,136,149</b>	<b>99.93%</b>	<b>59,581</b>
	Belanja Barang	193,281,000	193,136,149	99.93%	59,581
5	<b>Dilmil I-03 Padang</b>	<b>244,844,000</b>	<b>243,941,950</b>	<b>99.63%</b>	<b>902,050</b>
	Belanja Barang	244,844,000	243,941,950	99.63%	902,050

6	<b>Dilmil I-04 Palembang</b>	<b>206,878,000</b>	<b>201,137,635</b>	<b>97.23%</b>	<b>5,740,365</b>
	Belanja Barang	206,878,000	201,137,635	97.23%	5,740,365
7	<b>Dilmil I-05 Pontianak</b>	<b>120,777,000</b>	<b>116,544,500</b>	<b>96.50%</b>	<b>4,232,500</b>
	Belanja Barang	120,777,000	116,544,500	96.50%	4,232,500
8	<b>Dilmil I-06 Banjarmasin</b>	<b>56,492,000</b>	<b>49,185,560</b>	<b>87.07%</b>	<b>7,306,440</b>
	Belanja Barang	56,492,000	49,185,560	87.07%	7,306,440
9	<b>Dilmil I-07 Balikpapan</b>	<b>128.175.000</b>	<b>127.912.629</b>	<b>99.80%</b>	<b>262</b>
	Belanja Barang	128.175.000	127.912.629	99.80%	262
10	<b>Dilmil II Jakarta</b>	<b>253,164,000</b>	<b>252,880,000</b>	<b>99.89%</b>	<b>284,000</b>
	Belanja Barang	253,164,000	252,880,000	99.89%	284,000
11	<b>Dilmil II-08 Jakarta</b>	<b>196,592,000</b>	<b>159,859,500</b>	<b>81.32 %</b>	<b>36,732,500</b>
	Belanja Barang	196,592,000	159,859,500	81.32 %	36,732,500
12	<b>Dilmil II-09 Bandung</b>	<b>213,564,000</b>	<b>213,524,000</b>	<b>99.98%</b>	<b>40,000</b>
	Belanja Barang	213,564,000	213,524,000	99.98%	40,000
13	<b>Dilmil II-10 Semarang</b>	<b>108,404,000</b>	<b>108,198,784</b>	<b>99.81%</b>	<b>205,216</b>
	Belanja Barang	108,404,000	108,198,784	99.81%	205,216
14	<b>Dilmil II-11 Yogyakarta</b>	<b>128,677,000</b>	<b>128,119,200</b>	<b>99.57%</b>	<b>557,800</b>
	Belanja Barang	128,677,000	128,119,200	99.57%	557,800
15	<b>Dilmil III Surabaya</b>	<b>366,680,000</b>	<b>361,242,186</b>	<b>98.52%</b>	<b>5,437,814</b>
	Belanja Barang	366,680,000	361,242,186	98.52%	5,437,814
16	<b>Dilmil III-12 Surabaya</b>	<b>199,879,000</b>	<b>199,159,910</b>	<b>99.64%</b>	<b>719,090</b>
	Belanja Barang	199,879,000	199,159,910	99.64%	719,090
17	<b>Dilmil III-13 Madiun</b>	<b>82,899,000</b>	<b>80,501,500</b>	<b>97.11%</b>	<b>2,397,500</b>
	Belanja Barang	82,899,000	80,501,500	97.11%	2,397,500
18	<b>Dilmil III-14 Denpasar</b>	<b>101,025,000</b>	<b>101,007,550</b>	<b>99.98%</b>	<b>17,450</b>
	Belanja Barang	101,025,000	101,007,550	99.98%	17,450
19	<b>Dilmil III-15 Kupang</b>	<b>28,537,000</b>	<b>28,443,650</b>	<b>99.67%</b>	<b>93,350</b>
	Belanja Barang	28,537,000	28,443,650	99.67%	93,350
20	<b>Dilmil III-16 Makassar</b>	215,089,000	209,719,100	<b>97.50%</b>	5,369,900
	Belanja Barang	215,089,000	209,719,100	97.50%	5,369,900
21	<b>Dilmil III-17 Manado</b>	<b>234,424,000</b>	<b>233,195,550</b>	<b>99.48%</b>	<b>1,228,450</b>
	Belanja Barang	234,424,000	233,195,550	99.48%	1,228,450
22	<b>Dilmil III-18 Ambon</b>	<b>182,080,000</b>	<b>182,044,000</b>	<b>99.98%</b>	<b>36,000</b>
	Belanja Barang	182,080,000	182,044,000	99.98%	36,000
23	<b>Dilmil III-19 Jayapura</b>	<b>729,080,000</b>	<b>721,022,850</b>	<b>98.89%</b>	<b>8,057,150</b>
	Belanja Barang	729,080,000	721,022,850	98.89%	8,057,150

Berikut Realisasi Anggaran pada kegiatan sidang di luar pengadilan (sidang keliling) pada Jajaran Peradilan Militer sebagai berikut:

NO	SATKER	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI		SISA DANA
			Rp	%	
1	<b>Dilmiltama</b>	<b>58,820,000</b>	<b>58,586,812</b>	<b>99.60%</b>	<b>233,188</b>
	Biaya Uang Kebersihan	400,000	200,000	50.00%	200,000
	Penginapan	18,098,000	18,098,000	100.00%	0
	Tiket	29,700,000	29,698,812	100.00%	1,188
	Uang Harian	10,622,000	10,590,000	99.70%	32,000
2	<b>Dilmilti I Medan</b>	<b>409,535,000</b>	<b>408,280,229</b>	<b>99.69%</b>	<b>1,254,771</b>
	Transport	28,245,000	28,221,000	99.92%	24,000
	Penginapan	128,450,000	128,215,000	98.76%	970,259
	Tiket	174,720,000	174,694,488	99.99%	25,512
	Uang Harian	78,120,000	77,149,741	98.76%	970,259
3	<b>Dilmil I-01 Aceh</b>	<b>130,000,000</b>	<b>130,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Transport	11,520,000	11,520,000	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Penginapan	60,096,000	60,096,000	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	784,000	784,000	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Uang Harian	57,600,000	57,600,000	<b>100%</b>	<b>0</b>
4	<b>Dilmil I-02 Medan</b>	<b>70,002,000</b>	<b>69,976,000</b>	<b>99.96%%</b>	<b>26,000</b>
	Transport	3,618,000	3,600,000	99.50%	18,000
	Penginapan	32,688,000	32,680,000	99.98%	8,000
	Uang Kebersihan	396,000	396,000	100.00%	0
	Uang Harian	33,300,000	33,300,000	100.00%	0
5	<b>Dilmil I-03 Padang</b>	<b>157,104,000</b>	<b>157,104,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Transport	35,620,000	35,620,000	100.00%	0
	Penginapan	75,750,000	75,750,000	100.00%	0
	Biaya uang kebersihan	594,000	594,000	100.00%	0
	Uang Harian	45,140,000	45,140,000	100.00%	0
6	<b>Dilmil I-04 Palembang</b>	<b>101,000,000</b>	<b>100,985,635</b>	<b>99.99%</b>	<b>14,365</b>
	Biaya Uang Kebersihan	1,200,000	1,200,000	100%	0
	Penginapan	51,284,000	51,275,625	99.98%	8,375
	Tiket/Transport	5,196,000	5,190,000	99.88%	6,000
	Uang Harian	43,320,000	43,320,000	100%	0
7	<b>Dilmil I-05 Pontianak</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Transport	12,340,000	12,340,000	100%	0
	Penginapan	17,100,000	17,100,000	100%	0
	Biaya Uang Kebersihan	360,000	360,000	100%	0
	Uang Harian	15,200,000	15,200,000	100%	0
8	<b>Dilmil I-06 Banjarmasin</b>	<b>28,000,000</b>	<b>27,996,000</b>	<b>99.99%</b>	<b>4,000</b>
	Biaya Uang Kebersihan	200,000	200,000	100.0%	0

	Transport	4,004,000	4,000,000	99.9%	4,000
	Penginapan	15,156,000	15,156,000	100.0%	0
	Uang Harian	8,640,000	8,640,000	100.0%	0
9	<b>Dilmil I-07 Balikpapan</b>	<b>53,850,000</b>	<b>53,850,000</b>	<b>100%</b>	<b>53,850,000</b>
	Penginapan	33,210,000	33,210,000	100%	33,210,000
	Uang Harian	20,640,000	20,640,000	100%	20,640,000
10	<b>Dilmilti II Jakarta</b>	<b>158,760,000</b>	<b>158,737,000</b>		<b>23,000</b>
	Biaya Uang Kebersihan	600,000	600,000	0%	0
	Penginapan	83,460,000	83,453,000	99.99%	7,000
	Tiket	15,450,000	15,450,000	100.00%	0
	Uang Harian	59,250,000	59,234,000	99.97%	16,000
11	<b>Dilmil II-08 Jakarta</b>	<b>55,500,000</b>	<b>55,500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	400,000	400,000	100.00%	0
	Penginapan	26,700,000	26,700,000	100.00%	0
	Uang Harian	28,400,000	28,400,000	100.00%	0
12	<b>Dilmil II-09 Bandung</b>	<b>54,500,000</b>	<b>54,500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	600,000	600,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Transport	2,700,000	2,700,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Penginapan	37,200,000	37,200,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Uang Harian	14,000,000	14,000,000	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
13	<b>Dilmil II-10 Semarang</b>	<b>42,250,000</b>	<b>42,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	1,200,000	1,200,000	100%	0
	Transport	0	0	100%	0
	Penginapan	19,560,000	19,560,000	100%	0
	Tiket	4,480,000	4,480,000	100%	0
	Uang Harian	17,010,000	17,010,000	100%	0
14	<b>Dilmil II-11 Yogyakarta</b>	<b>52,600,000</b>	<b>52,600,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	200,000	200,000	100.00%	0
	Transport	400,000	400,000	100.00%	0
	Penginapan	22,400,000	22,400,000	100.00%	0
	Tiket	0	0	0	0
	Uang Harian	29,600,000	29,600,000	100.00%	0
15	<b>Dilmilti III Surabaya</b>	<b>242,650,000</b>	<b>242,611,846</b>	<b>99.98%</b>	<b>38,154</b>
	Uang Kebersihan	1,000,000	1,000,000	100%	0
	Transport	13,300,000	13,293,880	99,95%	6,120
	Penginapan	97,200,000	97,190,540	99,99%	9,460
	Tiket	68,650,000	68,627,426	99,97%	22,574
	Uang Harian	62,500,000	62,500,000	100%	0
16	<b>Dilmil III-12 Surabaya</b>	<b>68,540,000</b>	<b>68,540,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Transport	800,000	800,000	100.00%	0
	Penginapan	32,400,000	32,400,000	100.00%	0
	Tiket	0	0		

	Uang Harian	34,440,000	34,440,000	100.00%	0
	Uang Kebersihan	900,000	900,000	100.00%	0
17	<b>Dilmil III-13 Madiun</b>	<b>45,494,000</b>	<b>45,473,000</b>	<b>99.95%</b>	<b>21,000</b>
	Penginapan	22,134,000	22,113,000	99.91%	21,000
	Uang Harian	22,960,000	22,960,000	100.00%	0
	Biaya Uang Kebersihan	400,000	400,000	100.00%	0
18	<b>Dilmil III-14 Denpasar</b>	<b>65,450,000</b>	<b>65,445,000</b>	<b>99.99%</b>	<b>5,000</b>
	Transport	0	0	0.00%	0
	Penginapan	25,709,000	25,708,600	100.00%	400
	Tiket	4,741,000	4,736,400	99.90%	4,600
	Uang Harian	34,600,000	34,600,000	100.00%	0
	Biaya Uang Kebersihan	400,000	400,000	100.00%	0
19	<b>Dilmil III-15 Kupang</b>	<b>67,758,000</b>	<b>67,758,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	600,000	600,000	100.00%	0
	Penginapan	21,000,000	21,000,000	100.00%	0
	Tiket	22,078,000	22,078,000	100.00%	0
	Uang Harian	24,080,000	24,080,000	100.00%	0
20	<b>Dilmil III-16 Makassar</b>	<b>95,180,000</b>	<b>95,022,400</b>	<b>99.83 %</b>	<b>157,600</b>
	Transport	4,004,000	4,000,000	99.90%	4,000
	Penginapan	40,040,000	39,940,000	99.75%	100,000
	Tiket	11,236,000	11,202,400	99.70 %	33,600
	Uang Harian	39,900,000	39,880,000	100.00%	20,000
21	<b>Dilmil III-17 Manado</b>	<b>168,760,000</b>	<b>168,372,000</b>	<b>99.77%</b>	<b>388,000</b>
	Biaya Uang Kebersihan	600,000	600,000	100%	0
	Penginapan	60,840,000	60,452,000	99%	388,000
	Tiket	71,800,000	71,800,000	100%	0
	Uang Harian	35,520,000	35,520,000	100%	0
22	<b>Dilmil III-18 Ambon</b>	<b>114,867,000</b>	<b>114,867,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>
	Biaya Uang Kebersihan	400,000	400,000	100%	0
	Penginapan	30,000,000	30,000,000	100%	0
	Tiket	55,667,000	55,667,000	100%	0
	Uang Harian	28,800,000	28,800,000	100%	0
23	<b>Dilmil III-19 Jayapura</b>	<b>416,212,000</b>	<b>416,031,950</b>	<b>99.96%</b>	<b>180,050</b>
	Biaya Uang Kebersihan	1,400,000	1,400,000	100%	0
	Penginapan	130,327,000	130,327,000	100%	0
	Tiket	134,825,000	134,784,950	100%	40,050
	Uang Harian	149,660,000	149,520,000	99%	140,000

## B. Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Militer Utama ditempati sejak tanggal 1 April 2011 yang terletak di Jalan Raya Penggilingan - Cakung, Jakarta Timur, adapun sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi	Ket
<b>I</b>	<b>Ruangan Kepala</b>	1	B	
1.	Ruangan Wakil Kepala	1	B	
2.	Ruangan Hakim	4	B	
3.	Ruangan Panitera	1	B	
4.	Ruangan Sekretaris	1	B	
5.	Ruangan Sidang Umum	1	B	
6.	Ruangan Kepaniteraan	5	B	
7.	Ruangan Kesekretariatan	7	B	
8.	Ruangan Perpustakaan	1	B	
9.	Ruangan Oditur	1	B	
10.	Ruangan Penasehat Hukum	1	B	
11.	Ruangan Saksi	1	B	
12.	Ruangan Terdakwa	1	B	
13.	Ruangan Sel	2	B	
14.	Ruangan Laktasi	1	B	
15.	Ruangan Data	1	B	
16.	Ruangan Audiovisual	1	B	
17.	Ruangan Rapat	1	B	
18.	Ruangan Telekonferen	1	B	
19.	Ruangan Musyawarah Hakim	1	B	
20.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	1	B	
21.	Komputer	46	46B	
22.	Laptop	35	34B	1 RR
23.	LCD Proyektor/Infokus	2	2B	
24.	Mesin Fotocopy	2	2B	
25.	AC	64	64B	
26.	Faximile	8	8B	
27.	Genset	1	1B	
28.	Printer	48	48B	
29.	Lori Dorong	1	1B	
30.	Lemari Penyimpan	5	5B	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi	Ket
31.	Mesin Ketik Listrik	2	3B	
32.	Lemari besi metal	33	33B	
33.	Lemari kayu	12	12B	
34.	CCTV	32	32B	
35.	Rak besi	4	4 B	
36.	Filing kabinet besi	20	10 RR	
37.	Filing kabinet kayu	18	9 RR	
38.	Brandkas	2	2 B	
39.	Mobil file	2	2 B	
40.	Lemari display	1	1 B	
41.	Tabung pemadam api	5	5 B	
42.	Alat penghancur kertas	3	3 B	
43.	Papan pengumuman	2	2 B	
44.	Meja kerja kayu	72	72 B	
45.	Kursi besi/metal	194	194 B	
46.	Kursi kayu	11	11 RR	
47.	Bangku panjang kayu	6	6 B	
48.	Meja rapat	4	4 B	
49.	Meja komputer	36	36 B	
50.	Tempat tidur kayu	2	2 B	
51.	Meja resepsionis	2	2 B	
52.	Meja makan kayu	1	1 B	
53.	Kursi fiber glas/plastik	41	41 B	
54.	Gantungan jas	2	2 B	
55.	Meubelair lainnya	30	30 B	
56.	Alat pemberesih lainnya	4	4 B	
57.	Lemari es	6	6 B	
58.	Televisi	11	11 B	
59.	Tape recorder	1	1 B	
60.	Loudspeaker	8	8 B	
61.	Sound system	3	3 B	
62.	Megaphone	1	1 B	
63.	Lambang garuda pancasila	3	3 B	
64.	Gambar presiden/wakil presiden	3	3 B	
65.	Tiang bendera	8	8 B	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi	Ket
66.	Water filter	1	1 B	
67.	Tangga aluminium	1	1 B	
68.	Dispenser	18	18 B	
69.	Mimbar podium	1	1 B	
70.	Lambang instansi	1	1 B	
71.	Handycam	1	RB	
72.	Bingkai foto	1	1 B	
73.	Audio mixing portable	2	2 B	
74.	Microphone/wirles Mic	23	23 B	
75.	UPS	7	7 B	
76.	Power amplifier	1	1 B	
77.	Slide proyektor	1	1 B	
78.	Rak peralatan	3	3 B	
79.	Kamera digital	3	3 B	
80.	LCD monitor	5	5 B	
81.	Spliter	1	1 B	
82.	Contact printer	3	3 RB	
83.	Telepon (PABX)	1	1 B	
84.	Finger Printer	2	2 B	
85.	Switcher/patch panel	2	2 B	
86.	CPU (peralatan mainframe)	5	5 B	
87.	Scanner	7	7 B	
88.	Server	2	2 B	
89.	Router	1	1 B	
90.	Monografi	3	3 B	

Pengadilan Militer Utama pada Tahun 2025 menerima dana pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai DIPA sebesar Rp327.860.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan peruntukannya.

## 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Secara umum gedung kantor Pengadilan Militer Utama saat ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas sebagai berikut:

- a. Jaringan telepon yang dilengkapi dengan PABX dan instalasi untuk 5 unit anak hunting untuk keperluan komunikasi lokal.
- b. Pengeras suara untuk kesetiap ruangan sebagai fasilitas informasi terpusat (Toa).
- c. Jaringan internet, Local Area Connection serta Wireless Connection yang dapat menjangkau seluruh area Kantor dilengkapi management bandwidth dengan mikrotik.
- d. Alat Pemadam Kebakaran disetiap lantai tersedia masing-masing 3 buah,
- e. Setiap ruangan sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC)
- f. Kamera CCTV sebanyak 26 (dua puluh enam) titik.
- g. Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless LAN) dan Wired LAN,
- h. Selain fasilitas tersebut di atas Pengadilan Militer Utama memiliki sarana kendaraan dinas yang terdiri dari 7 buah kendaraan roda empat dan 6 buah kendaraan roda dua.

Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan pada barang milik negara berupa peralatan, perlengkapan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin meliputi kendaraan dinas bermotor, alat rumah tangga dan alat mesin kantor serta barang bergerak lainnya.

## 3. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1	Sedan Toyota Camry	2018	B	-	-	Sewa
2	Jeep Mitsubishi Pajero	2022	B	-	-	Sewa
3	Sedan Toyota Altis	2008	B	-	-	
4	Sedan Toyota Altis	2008	B	-	-	
5	Sedan Toyota Altis	2006	B	-	-	
6	Sedan Toyota Vios	2009	B	-	-	
7	Minibus Kijang Innova	2009	B	-	-	
8	Minibus Toyota Avanza	2006	B	-	-	
9	Minibus SUV Ford Escape	2006	B	-	-	
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Honda Mega Pro	2006	-	-	B	

2	Honda Mega Pro	2006	-	-	RR	
3	Honda Mega Pro	2005	-	-	RR	
4	Honda Mega Pro	2009	-	-	RR	
5	Honda Mega Pro	2008	-	-	B	
6	Honda Mega Pro	2008	-	-	B	

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

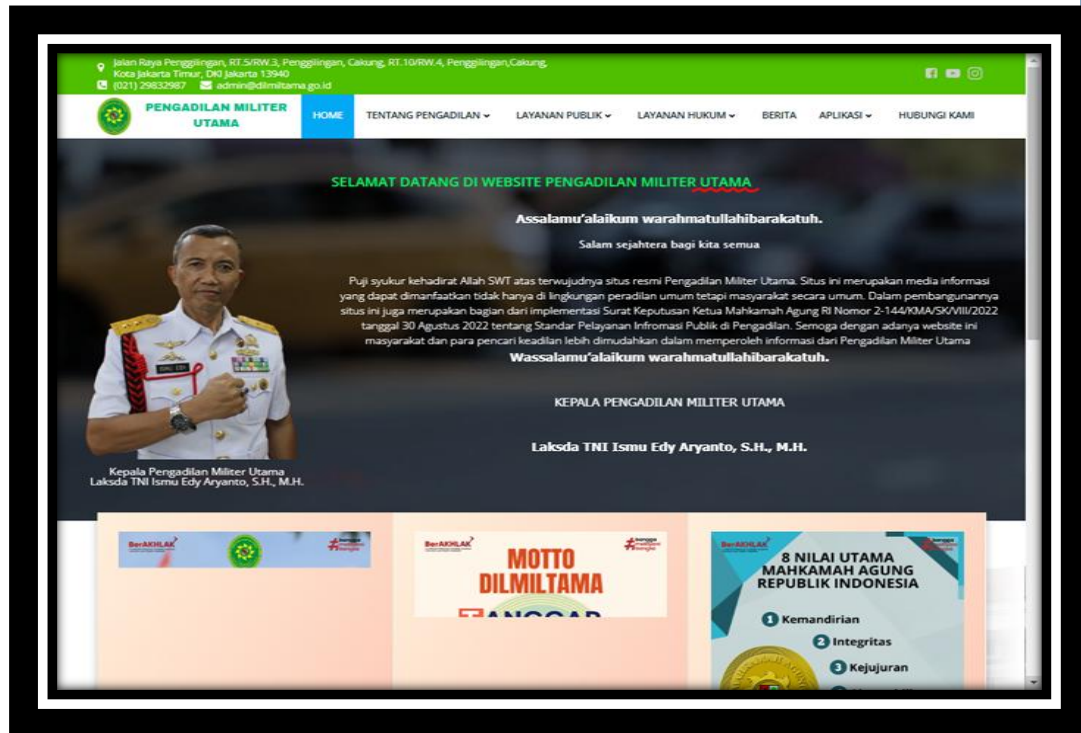
Pengadilan sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik melalui pengelolaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat menuntut para aparatur pengadilan militer utama untuk bekerja keras mengimplementasikan penerapan E-Government. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Militer Utama adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi, efektifitas dan kualitas pelayanan publik. Dalam penerapan teknologi informasi di Pengadilan Militer Utama, didasarkan pada asas berikut ini:

- a. Asas Keterpaduan/ Sinergi : Penerapan teknologi informasi diusahakan mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di Pengadilan Militer Utama dalam bentuk digitalisasi.
- b. Asas Peningkatan Kualitas SDM : para admin seperti komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPP, Medsos, Website sudah berjalan cukup baik dan lancar.
- c. Asas Manfaat : Pemanfaatan IT seperti komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPP, Medsos, Website sudah berjalan baik dan lancar yang harus diupayakan berdaya guna tinggi, dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi para pencari keadilan sehingga memudahkan dalam mengakses informasi yang dicari.
- d. Asas Fleksibilitas : Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dapat mengikuti perubahan - perubahan.

Sarana pengelolaan teknologi informasi melalui media untuk mendapatkan informasi pada Pengadilan Militer Utama diantaranya adalah:

#### a. Situs Website

Situs website <https://www.miltama.dilmiltama.go.id> adalah laman Pengadilan Militer Utama dengan antara lain berisi informasi kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh lembaga pengadilan.



### Rencana Sidang pada Website



## Laporan Perkara pada Website





## Laporan Realisasi Anggaran pada Website



- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan (pengelolaan administrasi perkara dan pembinaan pengawasan).

## INOVASI UNGGULAN

### Sie-Pertama





**Before**

Penyelesaian Perkara di Dilmilita masih menggunakan kertas, dan membutuhkan banyak kertas untuk menyelesaikan sebuah perkara

**After**

Tersedianya link Gdrive yang digunakan untuk mendistribusikan perkara dan sebagai media untuk mengerjakan putusan



**Benefit & Uses**

Memudahkan dalam monitoring, distribusi dan penyelesaian perkara karena dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan menggunakan perangkat masing-masing

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1O-t1qDhLBRwUQGITEoFoCWoTtE9nIEUP?usp=sharing>

## INOVASI UNGGULAN

### E-Binwasmil




**Before**

Belum adanya pedoman pelaksanaan Binwas di Lingkungan Peradilan Militer, serta luasnya Wilayah Hukum Pengadilan Militer Utama yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

**After**

Pelaksanaan kegiatan Binwas secara terintegrasi mulai dari perencanaan kegiatan, hingga Laporan. Sehingga permasalahan yang terjadi di Lingkungan Peradilan Militer dapat termonitor dengan cepat, begitu juga dengan kondisi sarpras dan kegiatan pelayanan



Aplikasi website

**Benefit & Uses**

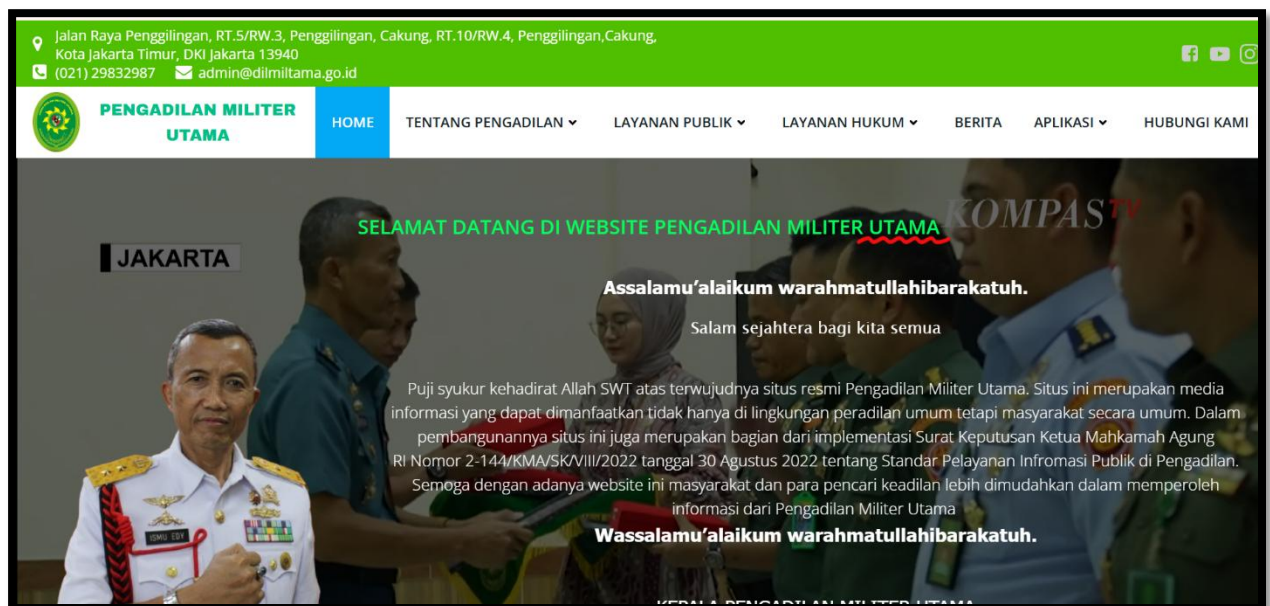
Bagi masyarakat adalah semakin meningkatnya pelayanan yang didapat dari Pengadilan Militer Utama di Lingkungan Peradilan Militer. Bagi Organisasi adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer.



- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).



- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi (melalui website dan media sosial).



## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal dimasyarakat internasional adalah Standar Sertifikasi ISO9001 : 2015 yaitu standar internasional dibidang sistem manajemen mutu dalam suatuorganissi seperti pengadilan. Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari pemerintah kepada Pengadilan tersebut yang telah memenuhi syarat Standar Pelayanan terhadap pencari Keadilan/Pengguna Jasa Pengadilan. Akrediatasi Pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan dan wajib disurveilance dalam 3 (tiga) tahun penilaian.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Utama sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Frame Work for Cour Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas Dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN pada tahun 2015.

Pada tanggal 06 September 2018 Pengadilan Militer Utama menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI. Sebuah sertifikat manajemen mutu bagi Pengadilan adalah suatu penilaian yang menjadikan tolok ukur kinerja sebuah Pengadilan. Sertifikat diberikan setelah melalui proses audit eksternal oleh Auditor Tim Audit dari Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018. Dengan adanya sertifikat akreditasi ini, masyarakat tidak perlu ragu lagi dengan Pengadilan Militer Utama, baik dari segi transparansi dan akuntabilitasnya. Berdasarkan Keputusan Direktur badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 119/Djmt Kep /7/2021 tanggal 14 Juli 2021 dan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 61/DJMT/Kep/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 serta Surat Keputusan Nomor Kep/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021 dan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 147/ DJMT/Ratgas/9/2021 pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2021 telah dilaksanakan kegiatan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer Utama mendapatkan nilai Akreditasi A (Sangat Baik).

Selain mendapatkan akreditasi penjaminan mutu, pada Tahun 2019 Pengadilan Militer Utama menerima sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan pada tahun 2020 menerima sertifikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### SERTIFIKAT ISO 9001 : 2015



## SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2021



## SERTIFIKAT ISO 9001 : 2015



## SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2018



## PIAGAM PENGHARGAAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) 2019



## PIAGAM PENGHARGAAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 2020



## B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi secara satu kesatuan mulai dari proses awal sampai dengan tahap penyelesaian suatu produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan mendasari keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor: 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara online dapat juga dilayani dengan mengisi aplikasi secara online melalui aplikasi PTSP Online melalui laman url : <https://dilmiltama.go.id/ptsp>.



### C. Inovasi Pelayanan Publik

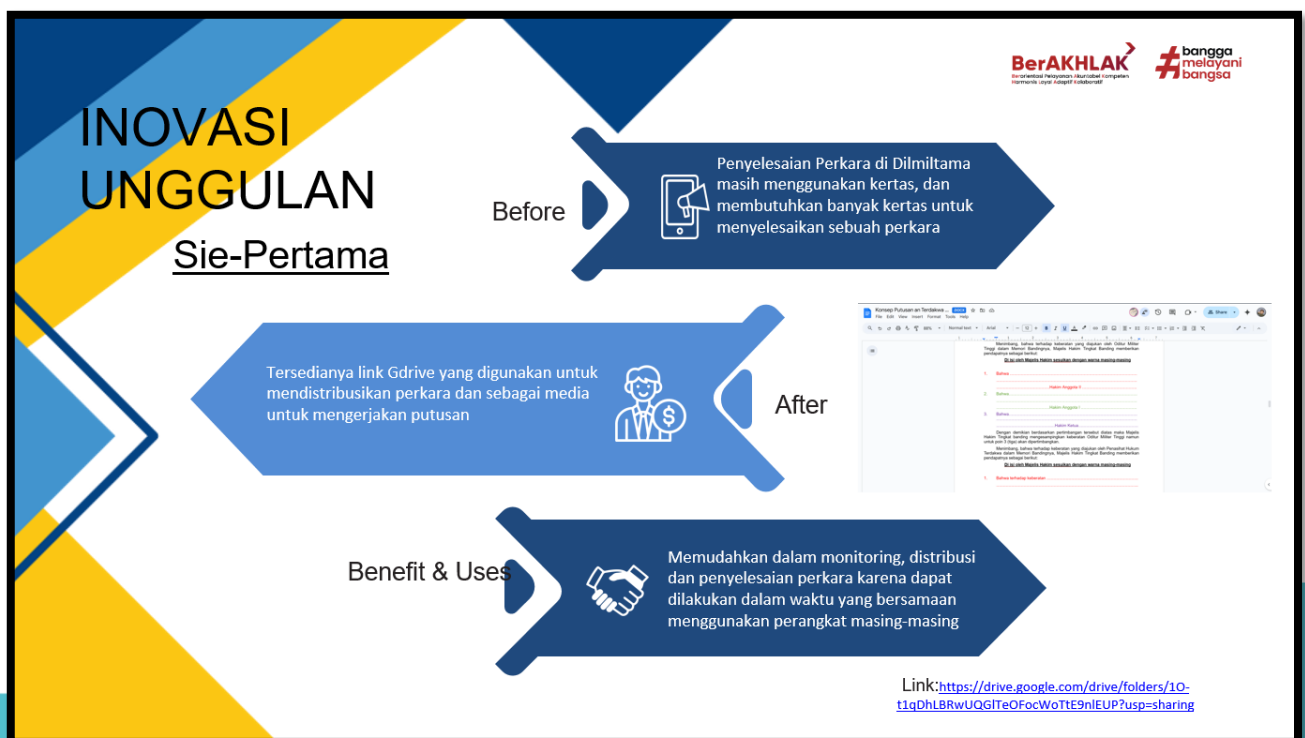
Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat maka Pengadilan Militer Utama terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dimana pelayanan tersebut harus cepat, tepat dan transparan. Pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan harus dikelola dengan suatu sistem yang baik pula seperti pada saat ini dituntut untuk menggunakan sistem elektronik. Penggunaan sistem elektronik merupakan suatu jawaban dari tuntutan akan pelayanan yang terbaik dimana dengan menggunakan sistem elektronik, maka suatu pekerjaan dapat dikelola dengan baik yang dimulai perencanaan sampai dengan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Militer Utama, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka pelayanan kepada para pencari keadilan ataupun kepada para pengguna layanan disabilitas dan kaum rentan, Pengadilan Militer Utama juga melakukan perbaikan fasilitas bagi pengguna layanan disabilitas dan kaum rentan.

Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pengadilan Militer Utama antara lain :

#### SIE-PERTAMA



## E - BINWASMIL

# INOVASI UNGGULAN

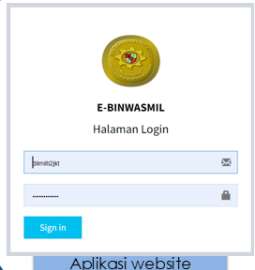
## E-Binwasmil

**Before**

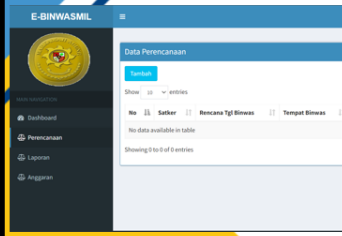
Belum adanya pedoman pelaksanaan Binwas di Lingkungan Peradilan Militer, serta luasnya Wilayah Hukum Pengadilan Militer Utama yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

**After**

Pelaksanaan kegiatan Binwas secara terintegrasi mulai dari perencanaan kegiatan, hingga Laporan. Sehingga permasalahan yang terjadi di Lingkungan Peradilan Militer dapat termonitor dengan cepat, begitu juga dengan kondisi sarpras dan kegiatan pelayanan



Aplikasi website



**Benefit & Uses**

- Bagi masyarakat adalah semakin meningkatnya pelayanan yang didapat dari Pengadilan Militer Utama di Lingkungan Peradilan Militer.
- Bagi Organisasi adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Peradilan Militer.

## BARCODE INFORMASI UPAYA HUKUM

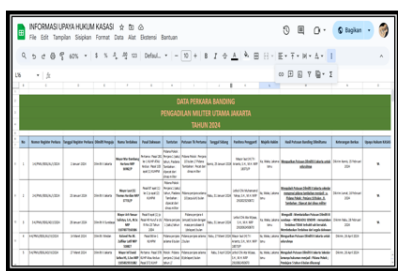
# INOVASI UNGGULAN

**Before**

Belum tersedianya ceklis informasi upaya hukum kasasi pada SIPP sehingga sulit untuk mengetahui putusan apa saja yang diajukan upaya hukum

**After**

Tersedianya link dan QR code sebagai media Informasi Upaya Hukum Kasasi yang dapat diisi oleh Dilmilti Pengaju



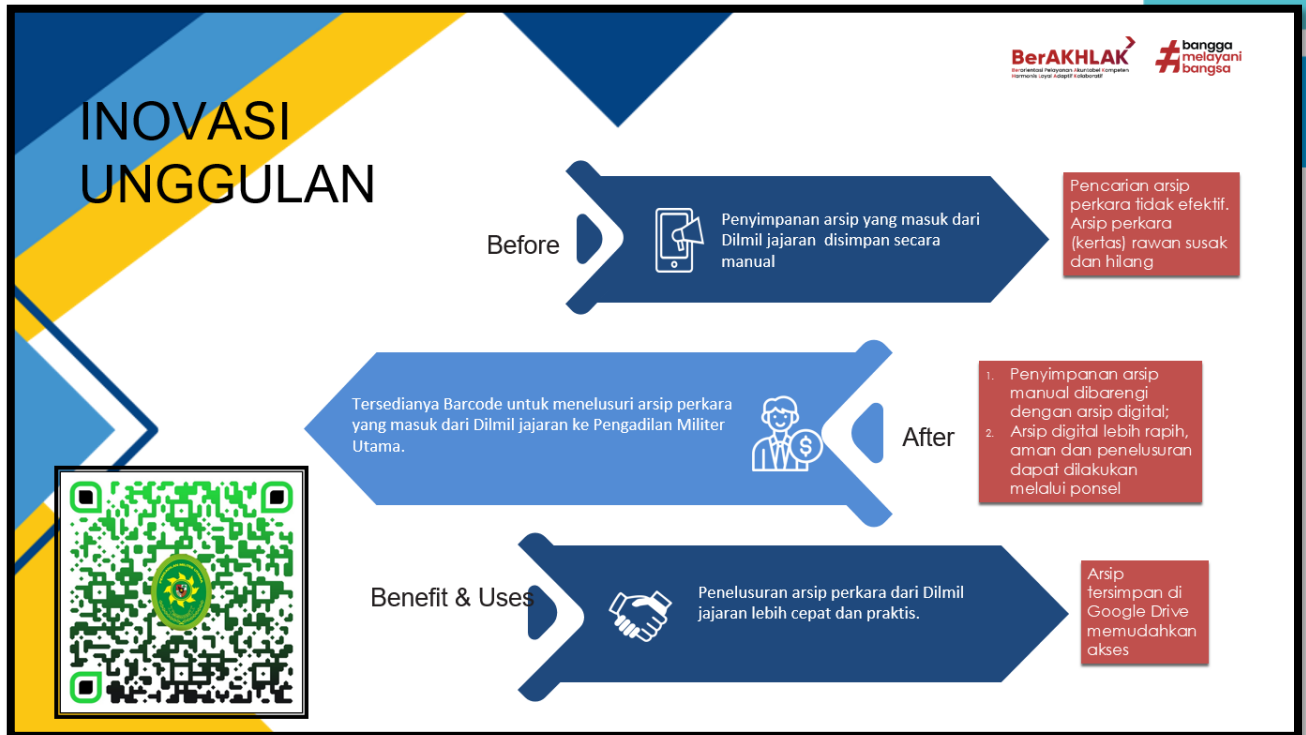


Link: <https://bit.ly/3FomoAD>

**Benefit & Uses**

Memudahkan dalam memperoleh dan melaporkan data Informasi Upaya Hukum Kasasi pada Unit Kerja dan Masyarakat melalui website

## BARCODE ARSIP PERKARA



## FASILITAS UNTUK KAUM PRIORITAS



# PROGRES PENINGKATAN PELAYANAN

FASILITAS JALAN PEMANDU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

BEFORE



AFTER



## PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

FASILITAS RUANG TUNGGU KHUSUS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM RENTAN PADA PENGADILAN MILITER UTAMA



## Inovasi Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas berupa Alur Pelayanan dan Kartu Prioritas



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer Utama meliputi Pengawasan Pembinaan bidang-bidang pada Pengadilan Militer Utama dan menindaklanjuti pengaduan.

#### **B. Pengawasan Daerah**

Untuk melaksanakan pengawasan pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer sewilayah hukum Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Utama mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: 4/KPMU/SK.PW1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Militer Utama sebagai Hakim Pengawas Daerah dan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 91/KPMU/SK.PW1.1.1/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 4/KPMU/SK.PW1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Militer Utama sebagai Hakim Pengawas Daerah di Lingkungan Peradilan Militer serta Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 104/KPMU/SK.PW1.1.1/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 91/KPMU/SK.PW1.1.1/IX/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penunjukan Hakim Militer Utama sebagai Hakim Pengawas Daerah tahun 2025 adalah:

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindaklanjutnya.
2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen. laporan daerah pembinaan dan pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan Pengadilan Militer Utama beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan.

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga terdapat formasi jabatan yang kosong. Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih perlu pembaruan dan pengadaan.

Rincian Pengawasan pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 diantaranya :

1. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin oleh Wakadilmiltama, Brigjen TNI Apel Ginting, S.H., M.H., Angpokkimmiltama, Brigjen TNI Faridah Faisal S.H., M.H., dan Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H. NRP 2910025250672 Panitera Pengganti Gol V Dilmiltama berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 227/KPMU/SP.PW1.2.1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2025;
2. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin oleh Sekretaris Dilmiltama, ASN Nuratiah , S.H., M.H. Pembina Utama Muda Gol IV/c., NIP 197109051998032005 Sekretaris Dilmiltama berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Nomor 226/KPMU/SP.PW1.2.1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2025;

3. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer III-17 Manado oleh Laksma TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., dan Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H., serta Letkol Laut (H) Rachmad Roni, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 354/KPMU/SP.PW1.2.1/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 dan Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H. NRP 11980024280972 Kepala Bagian Umum dan Keuangan Dilmiltama berdasarkan Surat Perintah Nomor 355/KPMU/SP.PW1.2.1/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Juli 2025 di Pengadilan Militer III-17 Manado;
4. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H., Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H., ASN Herdian Syahfrudin, A.Md., Kopda Tri Priyo Nugroho, S.H., dan ASN M. Rizky Mathew berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 757/KPMU/SP.PW1.2.1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 dan oleh Kolonel Kum M. Idris, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 757/KPMU/SP.PW1.2.1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 di Pengadilan Militer II-09 Bandung;
5. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta oleh Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., Brigjen TNI Faridah Faisal S.H, M.H., Brigjen TNI Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H, M.H., Brigjen TNI Ida Yanti, S.H., M.H., ASN Nuratiah, S.H., M.H., Letkol Chk Ata Wijaya, S.H., M.H., dan ASN Anastasia Kusumawardani, S.E., berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 758/KPMU/SP.PW1.2.1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang dilaksanakan tanggal 16 s.d 17 Desember 2025 di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta; dan
6. Pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., Brigjen TNI Faridah Faisal S.H, M.H., Brigjen TNI Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H, M.H., Brigjen TNI Ida Yanti, S.H., M.H., ASN Nuratiah, S.H., M.H., Letkol Chk Ata Wijaya, S.H., M.H., dan ASN Dwi Mulyanto, S.E., M.M. berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 759/KPMU/SP.PW1.2.1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 19 Desember 2025 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

### C. Pengawasan Bidang

Kepala Pengadilan Militer Utama mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 25/KPMU/SK.PW1.1/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 100/KPMU/SK.PW1.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 25/KPMU/SK.PW1.1/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Militer Utama sebagai Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer Utama serta Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 122 /KPMU/SK.PW1.1/XI/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 100/KPMU/SK.PW1.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Penunjukan Hakim Militer Utama sebagai Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer Utama adalah:

#### 1. Bidang Teknis

- a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding dan perbedaan pendapat, di Pengadilan Militer Utama;
- b. Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara banding dan perkara perbedaan pendapat;
- c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding dan perkara perbedaan pendapat;
- d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding dan perkara perbedaan pendapat;
- e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding dan perkara perbedaan pendapat;
- f. Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding dan perkara perbedaan pendapat;
- g. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara; dan
- h. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Kepala Pengadilan Militer Utama dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

#### 2. Bidang Kesekretariatan

- a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim,

## Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Militer Utama tahun 2025 secara umum sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menduduki jabatan di Kepaniteraan, hingga saat ini masih berada di ruang dinas yang lama, belum mendapatkan meja dan kursi sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan penyelesaian perkara.
- b. Penyeragaman putusan perkara masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/Tuakamil/SK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.
- c. Buku penjilidan tahun 2023 dan 2024 masih belum diproses sebanyak 12 berkas perkara, Anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan sarana penjilidan karena berkas perkara tersebut telah melewati tahun anggaran yang seharusnya.
- d. Kebutuhan akan sarana elektronik dalam pengamanan dan pencadangan data perkara kepaniteraan antara lain; Hardisk Eksternal untuk menunjang pelaksanaan register elektronik untuk melakukan pencadangan data dan *Upgrade* kapasitas penyimpanan pada link Gdrive SiePERTAMA sebagai sarana penyelesaian perkara secara digital.
- e. Pembukuan Keuangan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan.
- f. Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
- g. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik.
- h. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi.
- i. Uraian tugas untuk setiap personel pada Sekretariat telah dibuat dan ditempatkan di meja masing-masing personel.
- j. Kebersihan meja masing-masing personel telah baik.
- k. Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Militer Utama sudah berjalan baik.

Adapun Kendala yang masih dihadapi pada Pengadilan Militer Utama adalah:

- a. Sumber daya manusia masih kurang untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di Pengadilan Militer Utama, diantaranya untuk jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Tata Usaha Militer, Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi, dan staf perpustakaan;
- b. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang terutama dalam hal ruang kerja Panitera dan Sekretaris yang belum layak, ruang arsip dan lemari arsip; dan
- c. Kurangnya dukungan anggaran dalam hal digitalisasi organisasi yang mendukung dalam hal pengembangan teknologi informasi pada Pengadilan Militer Utama.

### 3. Penanganan Pengaduan

Selama kurun waktu tahun 2025, berdasarkan data yang ada pada email pengaduan, aplikasi SIWAS dan aplikasi SP4N LAPOR tidak ada data pengaduan yang masuk atau dengan kata lain **NIHIL**.

### D. Evaluasi

Pada tahun 2025 dilakukan pengawasan bidang di Pengadilan Militer Utama dan pengawasan daerah kepada 22 satker di wilayah hukum Pengadilan Militer Utama dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan *briefing* setiap melakukan pengawasan baik di Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer;
2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan pada periode sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif; dan
3. Pada tahun 2025, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui :
  - a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan responden terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Peradilan sebesar 94,65 dengan mutu pelayanan **SANGAT BAIK**; dan

- b. Indeks Persepsi Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Persepsi Korupsi di Pengadilan Militer Utama pada tahun 2025, hasil Indeks Persepsi Korupsi terhadap responden sebesar 97,30 dengan mutu persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**.

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Selama tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan, diantaranya:

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Militer Utama terhadap Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
4. Seluruh pengadilan di wilayah Pengadilan Militer Utama sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
5. Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala antara lain:
  - a. Sumber daya manusia masih kurang untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di Pengadilan Militer Utama, diantaranya untuk jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Tata Usaha Militer, Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi, dan staf perpustakaan;
  - b. Sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran masih kurang terutama dalam ruang kerja Panitera dan Sekretaris yang belum layak, ruang arsip dan lemari arsip; dan

- c. Kurangnya dukungan anggaran dalam hal digitalisasi organisasi yang mendukung dalam hal pengembangan teknologi informasi pada Pengadilan Militer Utama.

Semoga laporan ini menjadi tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan ini.

Jakarta, 14 Januari 2026  
Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.  
Laksamana Muda TNI

# LAMPIRAN

**KENAIKAN PANGKAT PERSONEL PNS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN/KESATUAN	LAMA/BARU				PERIODE	KET
			PANGKAT	GOL	PANGKAT	GOL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN</b>								
1.	Febrica Hotmaulina Sitorus, S.H. 198411122009042011	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Militer Tinggi I Medan	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	01/04/2025	
2.	Niko Wijaya, S.M. 199310102022031006	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Militer I-04 Palembang	Pengatur	II/c	Penata Muda	III/a	01/06/2025	
3.	Raald Afan Abdillah, S.Ak 199909272022031008	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Pengatur	II/c	Penata Muda	III/a	01/06/2025	
4.	Sugeng Nuraini 197306201998031003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	01/10/2025	
5.	Wintar Limbong, S.Kom., M.H. 198402102011011013	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	01/11/2025	
6.	Dessy Rahayu, S.E., M.H. 198012172006042003	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Militer I-02 Medan	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	01/11/2025	
7.	Ismail Usman, S.H., M.H. 197512311998031002	Sekretaris Pengadilan Militer I-02 Medan	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b	01/11/2025	
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA</b>								
8.	Cahyani Nurpriyanti, S.H. 197708291997012001	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	01/04/2025	
9.	Wina Noviani Fatimah, S.T., M.Kom. 198611012011012009	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Militer II-09 Bandung	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a	01/04/2025	

NO	NAMA/NIP	JABATAN/KESATUAN	LAMA/BARU				PERIODE	KET
			PANGKAT	GOL	PANGKAT	GOL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Woh Handiko, A.Md. 197707042001121001	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Militer II-10 Semarang	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	01/04/2025	
11.	Danu Lupita, S.H. 197210102006041001	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c	01/04/2025	
12.	Suswantari, S.H. 196912071992032002	Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d	01/04/2025	
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA</b>								
13.	Angga Permana Putra, A.Md., S.H. 198509212009041002	Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata Tingkat I	III/c	01/04/2025	
14.	Sri Susmawati, S.H. 196909041992032002	Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata Tingkat I	III/c	01/04/2025	
15.	Nova Prihastuti, S.H. 198411272011012015	Pranata Keuangan APBN – Mahir Pengadilan Militer III-18 Ambon	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata Tingkat I	III/c	01/04/2025	
16.	Muhammad Adib Hardiansyah, S.E. 199207192020121006	Pranata Keuangan APBN - Mahir Pengadilan Militer III-18 Ambon	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b	01/08/2025	

Mengetahui  
Kabag Perencanaan & Kepegawaian

Erichon Bangun, S.E., M.M.  
NIP. 197312112002121002

Jakarta, 14 Januari 2026  
Operator Penata Layanan Operasional

Ahmad Imanuddin, S.A.P.  
NIP. 198610212019031004

**PERSONIL PNS YANG PENSIUN TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

NO	NAMA	NIP	GOL	TANGAL LAHIR/ TMT PENSIUN	UNIT KERJA TERAKHIR	BATAS USIA PENSIUN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN</b>							
1	Deny Faisal, S.H.	197202171992031002	II/c	17-02-1972 01/01/2025	Pengadilan Militer I-02 Medan	53 Tahun	Meninggal Dunia
2	Zulfidar, S.Sos.	196703201998031002	III/c	20-03-1967 01-04-2025	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	58 Tahun	BUP KPP
3	Agustina Yanti, S.H.	196708151989032002	III/d	15-08-1967 01-09-2025	Pengadilan Militer I-04 Palembang	58 Tahun	BUP KPP
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA</b>							
4	Musdalipah, S.H.	196704111992032005	IV/a	11-04-1967 01-05-2025	Pengadilan Militer III-16 Makassar	58 Tahun	BUP KPP
5	Musa John Maaturwey, S.H.	196706061998031004	III/d	06-06-1967 01-07-2025	Pengadilan Militer III-18 Ambon	58 Tahun	BUP KPP

Mengetahui  
Kabag Perencanaan & Pegawaiian

Erichon Bangun, S.E., M.M.  
NIP. 197312112002121002

Jakarta, 14 Januari 2026  
Operator Penata Layanan Operasional

Ahmad Imanuddin, S.A.P.  
NIP. 198610212019031004

MUTASI PERSONEL PNS DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER TAHUN 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/NIP	NO/ TGL. KEP PEJABAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA</b>						
1.	Atrya Yusnidhar, S.H., M.H	Penata Muda Tk. I (III/b) 198806212019032008	25051/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 28 Agustus 2025	Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Militer II-10 Semarang	Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Kendal	TOD TOA
<b>JAJARAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA</b>						
2.	Dhanang Sri Anunggita, S.Sos.	Penata Muda (III/a), 198402192019031005	25715/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 28 Agustus 2025	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	TOD
3.	Komang Ary Tebuana, S.Kom.	Penata Muda Tk.I (III/b) 199607182019031003	25646/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 28 Agustus 2025	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Mataram	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Militer III-14 Denpasar	TOD TOA

Mengetahui  
Kabag. Perencanaan & Kepegawaian

  
Erichon Bangun, S.E., M.M.  
NIP. 197312112002121002

Jakarta, 14 Januari 2026  
Operator Penata Layanan Operasional

  
Ahmad Imanuddin, S.A.P.  
NIP. 198610212019031004